

**PELEMBAGAAN DAN ELEKTABILITAS PARTAI ACEH PADA
PILKADA ACEH SELATAN TAHUN 2018**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

MUHAMMAD IKHSAN

NIM. 150801058

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019**

**PELEMBAGAAN DAN ELEKTABILITAS PARTAI ACEH
PADA PILKADA ACEH SELATAN TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Studi Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Politik

Oleh:

MUHAMMAD IKHSAN

NIM. 150801058

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, M.A

NIP. 19620719 200112 1 001


Rizkika Lhena Darwin, M.A

NIP. 19881207 201803 2 001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh :
MUHAMMAD IKHSAN
NIM. 150801058

Pada hari / Tanggal
Selasa : 14 Januari 2020
19 Jumadil Awwal 1441

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, M.A
NIP.196207192001121001

Sekretaris



Rizkika Lhena Darwin, MA
NIP.198812072018032001

Penguji I



Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 198103162011011003

Penguji II



Aklima, S. Fil. I, MA
NIP. 19610670619911011000

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ikhsan
NIM : 150801058
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik (IPOL)
Judul : Pelembagaan dan Elektabilitas Partai Aceh Pada Pilkada Aceh Selatan Tahun 2018
Tanggal Sidang : 16 Januari 2020
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
Pembimbing II : Rizkika Lhena Darwin, MA
Kata Kunci : *Pelembagaan, Elektabilitas, Pilkada*

Partai Aceh merupakan partai politik lokal yang lahir melalui nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan Aceh lewat perjanjian damai yang dikenal dengan sebutan *Memorandum of Understanding (MoU)* di Helsinki, Finlandia. Di kabupaten Aceh Selatan, Partai Aceh mengalami kemerosotan yang cukup signifikan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada), yaitu belum pernah menguasai kursi eksekutif di Aceh Selatan. Argumentasi saya, terdapat pengaruh pelembagaan terhadap elektabilitas Partai Aceh pada Pilkada Aceh Selatan tahun 2018. Dari permasalahan tersebut, maka terdapat dua hal yang ingin saya lihat, yaitu: *Pertama*, bagaimana elektabilitas partai Aceh pada Pilkada Aceh Selatan, *kedua*, bagaimana pelembagaan Partai Aceh sehingga mempengaruhi elektabilitas partai Aceh pada ranah electoral. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Partai Aceh mempunyai tingkat keterpilihan atau elektabilitas yang relatif rendah dibandingkan dengan partai-partai lain pada Pilkada Aceh Selatan. *Kedua*, sumber daya dan faksi menjadi kunci lemahnya pelembagaan Partai Aceh, ditambah lagi dengan tingkat pengetahuan masyarakat akan internal Partai Aceh ikut mempengaruhi menurunnya elektabilitas Partai Aceh. Dari hasil inilah kemudian dapat disimpulkan bahwa lemahnya pelembagaan Partai Aceh mempengaruhi elektabilitas yang pada akhirnya menurun, sehingga perlu perbaikan-perbaikan pada dataran sistem agar kembali menuai kepercayaan dari masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini yang berjudul *“Pelembagaan dan elektabilitas Partai Aceh Pada Pilkada Aceh Selatan Tahun 2018”*. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta, kepada Ayahanda (Almarhum) Sayuti MD yang telah memberikan pelajaran hidup yang sangat berarti bagi penulis, yang selalu memberikan motivasi agar tetap semangat dalam berbagai kondisi, yang telah mengajarkan penulis tentang arti kesabaran dan kesederhanaan. Kepada Ibunda tercinta Salmiati yang sangat menginginkan anak-anaknya memiliki pendidikan setinggi-tingginya, yang rela melakukan apapun untuk mendukung segala kebutuhan anak-anaknya, sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis hantarkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Abdullah Sani, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA sebagai Pembimbing I, dan kepada Ibu Rizkika Lhena Darwin, MA sebagai Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk membimbing dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Bapak Eka Januar, M.Soc.Sc selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen-dosen di FISIP terutama dosen prodi Ilmu Politik yang selama perkuliahan telah tulus dan ikhlas mendidik serta mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh Bapak /Ibu Staf Tata Usaha, Akademik, Prodi, Sekretariat, Perpustakaan FISIP UIN Ar – Raniry Banda Aceh, terutama kepada kak Muhibbah yang telah banyak membantu saya dalam segala urusan di kampus, terimakasih atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
8. Pihak dari DPW Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi seputaran skripsi ini, terutama Abangda Idrus TM dan Abangda Deni Marwan. Juga kepada

Geuchik Lhok Keutapang dan keluarga yang telah membantu penulis di lapangan dalam rangka penelitian di Aceh Selatan, serta seluruh informan yang turut membantu saya memberikan informasi.

9. Kepada adik tercinta, Andrian, Ammar Zaki, Miza Zahrina, dan Siti Aulia Naurah, yang selalu menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan kuliah hingga hari ini.
10. Kepada keluarga besar yang berada di kampung halaman, nenek, paman, bibi, manda dan semuanya yang telah memberikan support yang luar biasa kepada penulis selama kuliah, terimakasih atas motivasinya.
11. Kepada teman-teman seperjuangan, yang bersama-sama datang dari kampung halaman untuk menuntut ilmu di ibu kota, Almarhum (Alvi), Riski Rahmadi, Taufiqul Hafiz, Fiska Hamzah, Noval Abizal, Nazaruddin, Masruddin, M. Tanwir Fuadi, terimakasih sudah menjadi bagian penting semasa perkuliahan dan kehidupan penulis.
12. Kepada seluruh teman-teman se-jurusan ilmu politik, baik angkatan 2015 maupun angkatan lainnya, terimakasih telah memberikan support kepada penulis selama perkuliahan sampai di tahap penyelesaian penulisan skripsi ini.
13. Kepada seluruh pengurus DEMA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan periode 2018-2019 yang telah berjuang bersama sepanjang kehidupan di kampus tercinta ini.
14. Kepada keluarga besar HMI Komisariat FISIP UIN Ar-Raniry, terimakasih atas pelajaran yang sangat berharga bagi penulis tentang betapa besarnya arti

perjuangan, baik dalam perkuliahan, organisasi, dan pergerakan. Yakin Usaha Sampai.

15. Kepada pengurus HMI cabang Banda Aceh periode 2019-2020 yang mendukung saya dalam penulisan skripsi ini, juga kepada seluruh kader HMI sekawasan Banda Aceh yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu.

Segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis pastinya tidak akan sanggup penulis balas, dan hanya Allah yang dapat membalasnya. Semoga Allah memberikan ganjaran setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 6 Januari 2020
Penulis,

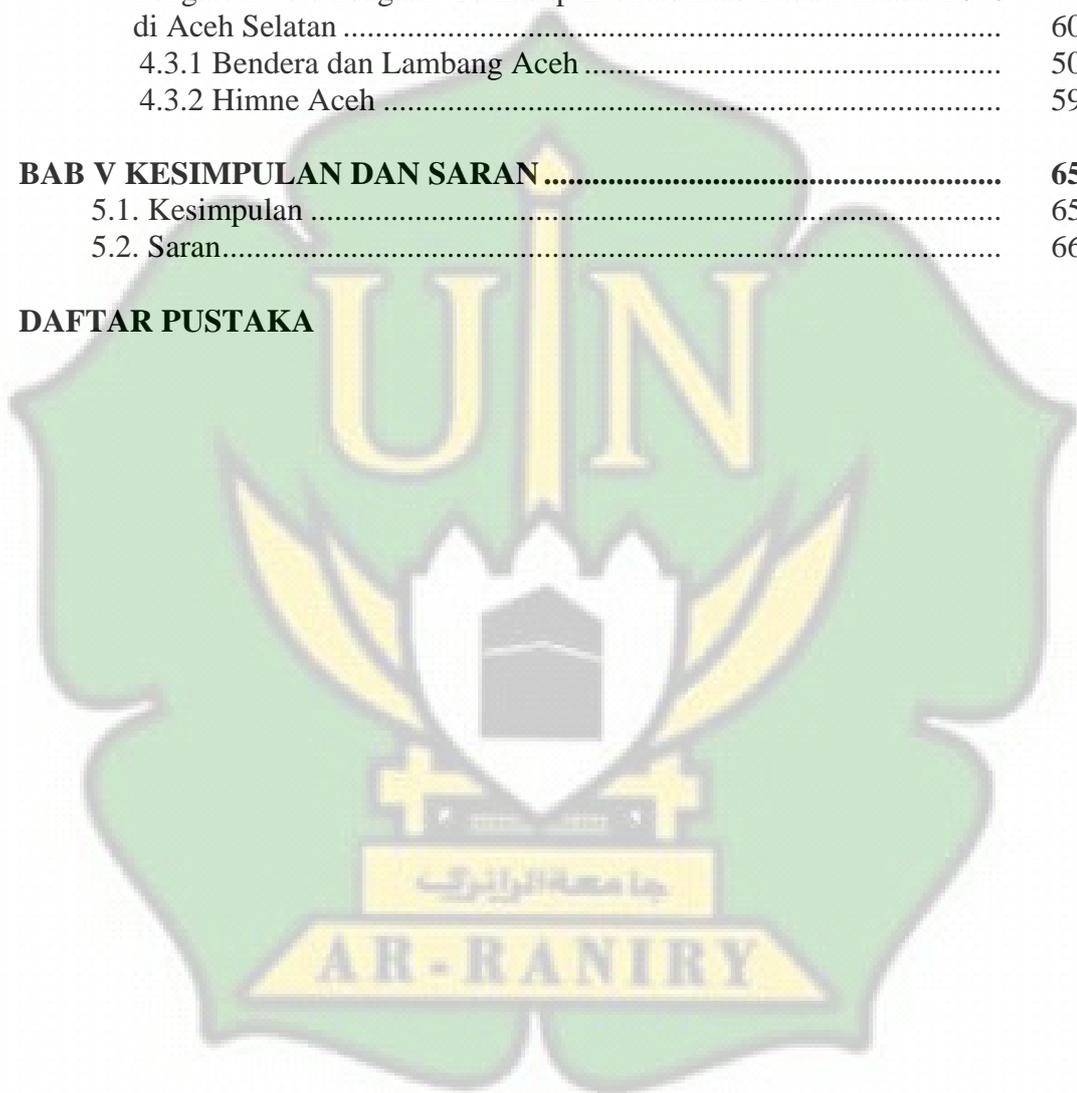
Muhammad Ikhsan

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Penjelasan Istilah	6
1.6 Kajian Pustaka	11
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Pelembagaan Partai Politik	15
2.1.1 Derajat Kesisteman.	16
2.1.2 Derajat Identitas Nilai	18
2.1.3 Derajat Otonomi Keputusan	19
2.1.4 Derajat Reifikasi	19
2.2 Konsep Elektabilitas	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Teknik Pengumpulan Data	25
3.2.1 Observasi.....	26
3.2.2 Wawancara.....	26
3.2.3 Dokumentasi	27
3.3 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	28
3.3.1 Reduksi Data	29
3.3.2 Kategorisasi.....	30
3.3.3 Sintesisasi.....	30
3.3.4 Menyusun Hipotesis Kerja.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Profil Partai Aceh.....	32
4.1.1 Sejarah Partai Aceh.....	32
4.1.2 Platform Partai Aceh.....	34
4.1.3 DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan	36
4.1.4 Perjalanan Electoral Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan: Pemilu dan Pilkada	42

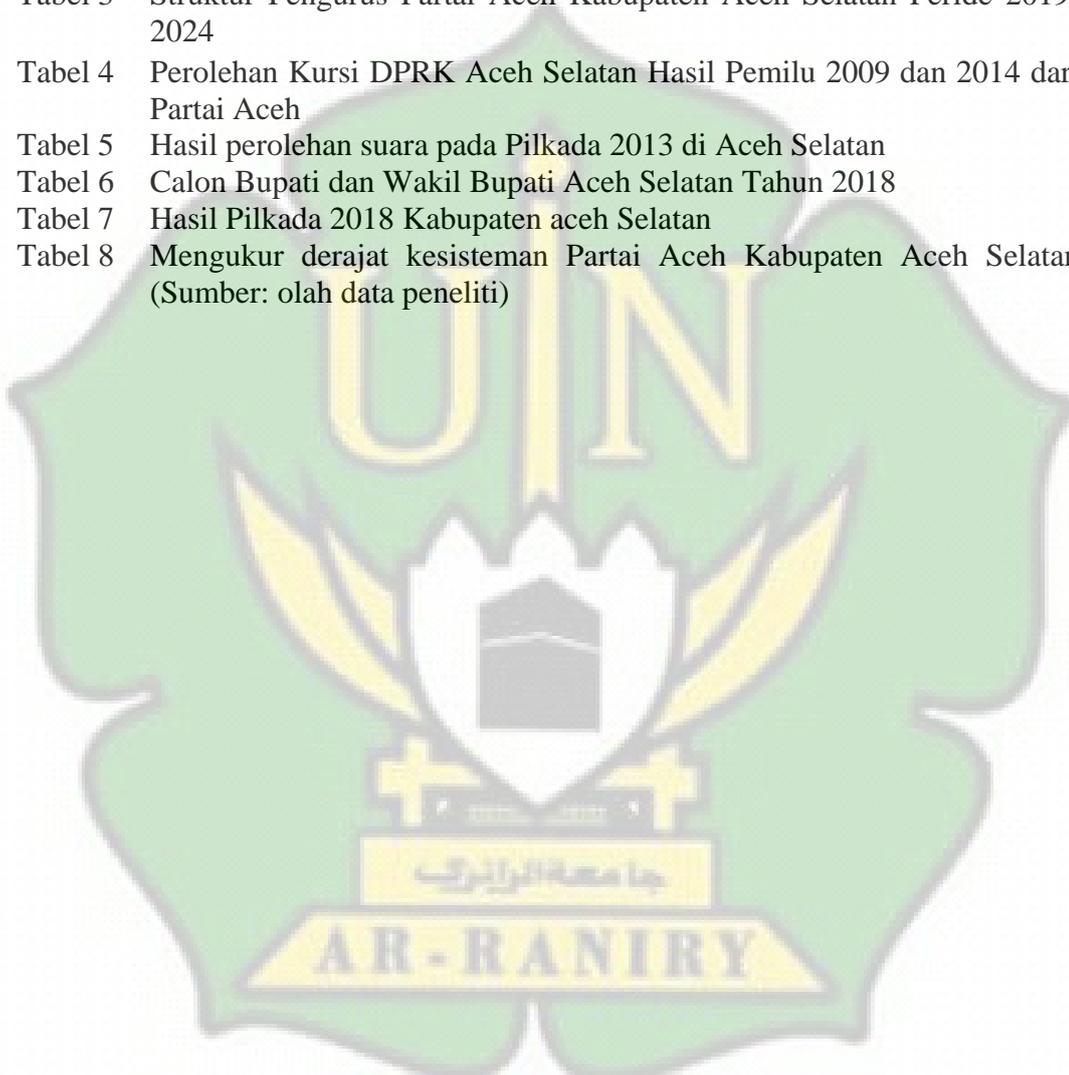
4.2 Pelembagaan DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan: Eksternal dan Internal	48
4.3.1 Dimensi Kesisteman	48
4.3.2 Dimensi Identitas Nilai	55
4.3.3 Dimensi Otonomi Keputusan.....	58
4.3.4 Dimensi Reifikasi.....	59
4.4 Pengaruh Pelembagaan Terhadap Elektabilitas Pada Pilkada 2018 di Aceh Selatan	60
4.3.1 Bendera dan Lambang Aceh	50
4.3.2 Himne Aceh	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA



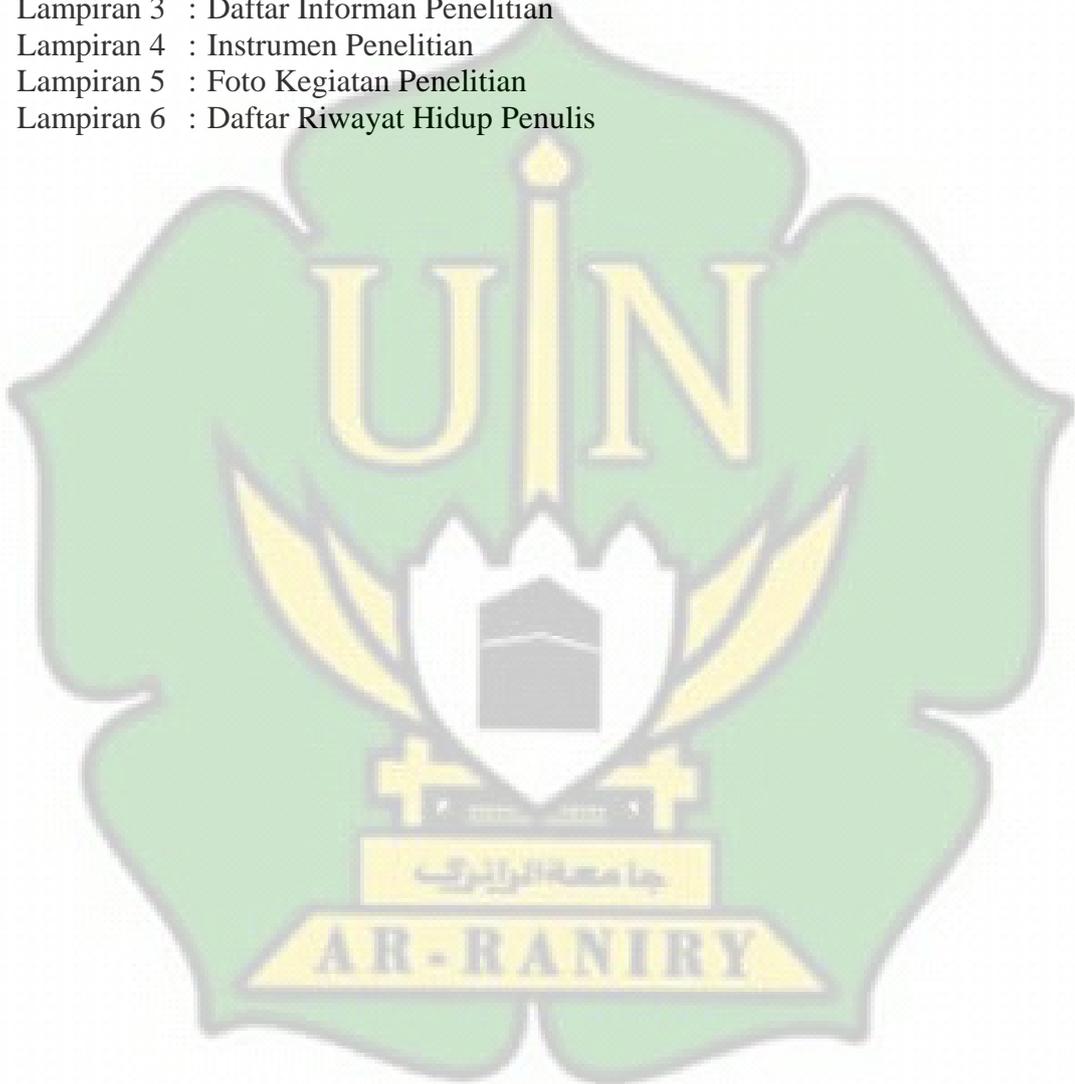
DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Dimensi Pelembagaan partai menurut Randall dan Svasand
- Tabel 2 Hasil Musyawarah Wilayah DPW Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan untuk periode 2019-2024
- Tabel 3 Struktur Pengurus Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan Peride 2019-2024
- Tabel 4 Perolehan Kursi DPRK Aceh Selatan Hasil Pemilu 2009 dan 2014 dari Partai Aceh
- Tabel 5 Hasil perolehan suara pada Pilkada 2013 di Aceh Selatan
- Tabel 6 Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018
- Tabel 7 Hasil Pilkada 2018 Kabupaten aceh Selatan
- Tabel 8 Mengukur derajat kesisteman Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan (Sumber: olah data peneliti)



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
- Lampiran 3 : Daftar Informan Penelitian
- Lampiran 4 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 5 : Foto Kegiatan Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai Aceh merupakan partai politik lokal yang lahir melalui rahim nota kesepahaman atau yang sering disebut *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintahan Indonesia yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, setelah konflik saudara yang cukup panjang semenjak pertama kali GAM dideklarasikan pada tahun 1976¹. MoU Helsinki ini kemudian dituangkan dalam UU nasional yaitu UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)². Pada klausul perjanjian tersebut pada dasarnya GAM meminta kepada Pemerintah Indonesia agar memberikan otonomi sepenuhnya, baik di bidang ekonomi, hukum sampai politik. Pada bidang politik, Aceh diberikan kewenangan khusus untuk dapat melakukan kerjasama luar negeri, calon independen di Pemilukada, dan Partai Politik Lokal.³

Salah satu keistimewaan yang berharga diperoleh Aceh dari perjanjian MoU Helsinki adalah partai politik lokal (parlok). Parlok selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik

¹Novri Susan, M.A, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009) , Hal. 139

²Chairul Fahmi, *Jejak Konflik Baru di Aceh: Pemetaan Jenis dan Sumber Konflik Politik, Hukum, Sumber Daya Alam, Agama, Etnis dan Ekonomi*,(Banda Aceh: Kesbangpol dan Linmas Provinsi Aceh, 2014). Hal. 4

³Zaki ‘Ulya, *Refleksi MoU Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Juni 2014, Hal. 373-374.

Lokal di Aceh, Pasal 1 angka 2 menyatakan: Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil walikota.

Berdasarkan uraian diatas, masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi dimana rakyat Aceh dapat di wujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi republik Indonesia. Untuk menjamin perdamaian yang hakiki dan bermartabat serta dapat membangun masa depan Aceh dan mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melalui proses demokrasi dengan partai politik lokal berdasarkan perjanjian MoU Helsinki.

Dengan pegangan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 di atas, kemudian lahirlah partai politik lokal pertama di Aceh dan juga Indonesia dengan nama Partai Aceh. Dengan perjuangan para kombatan GAM pada masa konflik, partai ini akhirnya mendapat tempat di hati masyarakat Aceh dengan

menjadi partai politik lokal yang mempunyai eksistensi yang cukup besar di tingkat provinsi yang di buktikan dengan menguasai parlemen⁴.

Kehadiran partai politik lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia, dan salah satu jalur untuk menempuh perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM. Dengan hadirnya partai politik lokal merupakan tambahan sarana untuk penyampaian aspirasi politik masyarakat. Saat ini masyarakat Aceh lebih leluasa dalam menunjukkan sikap politiknya melalui partai politik lokal yang terbentuk di Aceh.

Sementara itu di tingkat wilayah, Partai Aceh juga membangun kekuatan yang signifikan, seperti di Aceh Selatan. Partai Aceh menguasai parlemen Aceh Selatan semenjak mengikuti Pemilu pertama mereka pada tahun 2009. Menurut data pada Pemilu 2009 di Aceh Selatan, Partai Aceh menguasai kursi Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan dengan memperoleh 10 kursi dari total 30 kursi yg diperebutkan, dan pada pileg 2014 turun menjadi 5 kursi.⁵

Namun pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2013, kandidat yang diusung Partai Aceh yaitu Muhammad Natsir/Zulkifli kalah dengan

⁴<https://www.viva.co.id/arsip/504445-partai-aceh-kuasai-parlemen> tanggal akses 17/06/2019

⁵<http://aceh.tribunnews.com/2014/04/27/pa-kehilangan-5-kursi-di-dprk-aceh-selatan> tanggal akses 25/12/2018

perolehan suara 23.819.⁶ Partai Aceh juga kalah pada Pilkada 2018, pasangan H. Mirwan MS, SE/Zirhan, SP kalah dengan perolehan suara 33.972 suara.⁷

Berdasarkan data di atas, elektabilitas Partai Aceh pun mulai dipertanyakan, apa yang membuat kandidat yang diusung Partai Aceh selalu menuai kekalahan pada Pilkada Aceh Selatan. Padahal historis konflik di Aceh cukup kental, namun tidak berdampak pada elektabilitas Partai Aceh dalam Pilkada Aceh Selatan.

Melihat fenomena di atas, menuai tanda tanya terhadap elektabilitas Partai Aceh di kabupaten Aceh Selatan. Penulis merasa bahwa terdapat pengaruh pelebagaan partai terhadap elektabilitas Partai Aceh dalam Pilkada Aceh Selatan tahun 2018 dimana permasalahan-permasalahan internal Partai Aceh yang mendorong menurunnya elektabilitas partai tersebut. Dengan demikian, menarik bila mengkaji tentang: *“Pelebagaan dan Elektabilitas Partai Aceh Pada Pilkada Aceh Selatan Tahun 2018”*

⁶Hendra Hasliadi, *Kekalahan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Diusung Partai Aceh Pada Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan 2013*, Skripsi, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2014, Hal. 4

⁷<http://aceh.tribunnews.com/2018/07/04/hasil-pleno-kip-aceh-selatan-pasangan-azam-unggul-dengan-perolehan-46667-suara> tanggal akses 25/12/2018

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan dan studi pendahuluan yang telah dilaksanakan sebelumnya, penelitian ini menfokuskan kepada:

1. Bagaimana elektabilitas Partai Aceh pada pilkada Aceh Selatan tahun 2018?
2. Bagaimana pelebagaan Partai Aceh sehingga mempengaruhi elektabilitas Partai Aceh pada ranah elektoral?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui elektabilitas Partai Aceh pada pilkada Aceh Selatan tahun 2018;
2. Untuk mengetahui pelebagaan partai Aceh sehingga mempengaruhi elektabilitas partai Aceh pada ranah electoral;

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman mengenai bidang kajian partai politik lokal –yaitu Partai Aceh yang digunakan sebagai objek penelitian– dalam politik praktis di daerah Aceh.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Partai Politik Lokal yang ada di Aceh (khususnya pada objek penelitian) untuk memperkuat

pelebagaan Partai Aceh dan untuk penguatan kedaulatan demokrasi yang sudah di dapati daerah Aceh.

1.4.3 Secara Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan umum, agar sadar akan pentingnya kekuatan partai politik lokal.

1.5 Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini maka penulis menjelaskan pengertian istilah-istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Pelebagaan

Secara sederhana pelebagaan partai adalah proses pematapan partai politik (organisasi maupun individu-individu dalam partai) dalam rangka menciptakan pemolaan perilaku atau sikap/budaya untuk menghasilkan partai politik yang representatif dan mampu menjalankan fungsinya. Pelebagaan partai juga menyangkut bagaimana partai secara internal mampu memberdayakan dirinya agar tetap eksis menjalankan fungsinya. Institusionalisasi diorientasikan untuk terciptanya partai politik yang memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsinya dan berkompetisi dengan partai-partai lain.

Mainwaring dan Torcal secara khusus tidak membedakan dengan jelas perbedaan diantara keduanya, namun pelebagaan sistem kepartaian merujuk pada adanya nilai baku dan stabil pada interaksi diantara partai politik, atau proses dimana sistem kepartaian mendapatkan nilai baku dan stabil. Pelebagaan sistem kepartaian dengan pelebagaan partai politik berkaitan dengan erat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Mainwaring bahwa ada empat dimensi dalam pelebagaan sistem kepartaian. Pertama, sebuah sistem dimana partai besar sering muncul kemudian menghilang atau menjadi partai minoritas menunjukkan pelebagaan sistem yang lemah, sebagaimana total perolehan suara partai yang berfluktuasi dengan gap yang besar.⁸

Kedua, ikatan yang mengikat partai dan masyarakat lebih jelas. Sebaliknya, partai tidak menstruktur preferensi politik dari waktu ke waktu dan ada keteraturan yang terbatas dalam hal bagaimana orang memilih. Selain itu partai dalam sistem yang sudah terlebaga cenderung lebih konsisten dalam memposisikan ideologi mereka. Jika sebuah partai besar merubah posisi relatif ideologi mereka, biasanya ini menjadi sinyal lemahnya ikatan diantara partai dengan konstituen dan kurangnya proses regular bagaimana partai berkompetisi dan bagaimana hubungan mereka dengan aktor sosial. Ketiga, elit dan warga negara pada umumnya percaya pada partai sebagai lembaga yang fundamental, diperlukan, dan diinginkan dalam politik demokratis. Legitimasi adalah dimensi

⁸Nurlatipah Nasir, *Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelebagaan Partai Politik Di Indonesia : Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen*, Jurnal Politik Profetik Volume 4, No. 1 (STISIP Tasikmalaya: 2016) Hal. 45

pelembagaan karena konsep yang terakhir menyiratkan bahwa aktor mendasarkan perilaku mereka pada harapan bahwa praktek akan terus berlanjut. Legitimasi memperkuat kecenderungan aktor yang diharapkan untuk melanggengkan pola perilaku.⁹

Keempat, partai tidak tunduk pada kepentingan dari para pemimpin yang ambisius, namun memiliki status independen dan nilai mereka sendiri. Pelembagaan akan menjadi terbatas selama partai adalah instrumen pribadi dari seorang pemimpin atau segelintir elit. Sebagaimana pelembagaan berkembang, partai menjadi otonom vis-'a-vis individu yang awalnya mungkin telah menciptakan mereka sebagai instrumen belaka. Ini adalah tanda pelembagaan sistem yang lebih besar jika partai telah mengokohkan struktur, jika partai komprehensif secara teritorial, jika partai terorganisasi dengan baik, jika partai telah didefinisikan secara jelas mengenai struktur dan prosedur internal, dan jika partai memiliki sumber daya mereka sendiri. Dalam sistem yang lebih terlembaga, ada rutinisasi prosedur intraparty, termasuk prosedur untuk pemilihan dan perubahan kepemimpinan partai.¹⁰

⁹Nurlatipah Nasir, *Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia : Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen*, Jurnal Politik Profetik Volume 4, No. 1 (STISIP Tasikmalaya: 2016) Hal. 46

¹⁰Nurlatipah Nasir, *Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia : Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen*, Jurnal Politik Profetik Volume 4, No. 1 (STISIP Tasikmalaya: 2016) Hal. 47

2) Elektabilitas

Elektabilitas merupakan tingkat keterpilihan atau ketertarikan publik dalam memilih sesuatu, baik itu seorang figur, lembaga atau partai, maupun barang dan jasa, dimana informasi tersebut didapatkan dari hasil berbagai survei. Menurut Dendy Sugono Elektabilitas memiliki arti ketertarikan seseorang dalam memilih¹¹. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa, maupun orang, badan atau partai.

Secara bahasa, istilah elektabilitas adalah hasil serapan dari Bahasa Inggris, yaitu “electability” yang artinya keterpilihan. Kata elektabilitas sangat sering digunakan dalam kaitannya dengan bidang politik. Jika diterapkan pada bidang politik, misalnya partai politik, maka arti elektabilitas adalah tingkat keterpilihan suatu partai politik di masyarakat umum. Pada umumnya untuk meningkatkan elektabilitas sebuah objek (barang, jasa, orang, lembaga), maka objek tersebut harus populer dan memenuhi kriteria keterpilihan¹², misalnya:

- Dikenal baik oleh masyarakat luas
- Terbukti memiliki kinerja yang baik
- Memiliki prestasi di bidang tertentu
- Memiliki rekam jejak yang positif di bidangnya

¹¹Dendy Sugono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) Hal. 171

¹²<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/arti-elektabilitas-adalah.html> tanggal akses 8 Juli 2019

Elektabilitas sering di bicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye. Oleh sebab itu, perlu waktu yang cukup lama untuk mencapai elektabilitas, karena diperlukan dorongan dari usaha-usaha untuk memiliki kepercayaan masyarakat.

3) Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah merupakan tonggak demokrasi di Indonesia. Bahwa tolak ukur demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang di manifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 6 Tahun 2005, pasal 1 yaitu: Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.¹³

¹³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 1

4) Partai Politik Lokal

Pasal 1 angka 14 UUPA memberikan definisi partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota¹⁴.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UUPA menunjukkan bahwa partai politik lokal dalam tata hukum Indonesia hanya ada di Provinsi Aceh. Sementara di luar provinsi ini tidak ada partai politik lokal. Setelah disahkan UUPA banyak daerah di Indonesia berkeinginan memperoleh hak untuk mendirikan partai politik lokal. Namun hingga saat ini hanya Provinsi Aceh sajalah yang baru memiliki partai politik lokal.

Keberadaan partai lokal hanya diperuntukan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Gubernur Aceh/Wakil Gubernur Aceh, serta bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

1.6 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini ada beberapa kutipan referensi penelitian terdahulu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian, banyak penelitian-penelitian tentang partai politik yang mencoba mengukur elektabilitas dan tingkat

¹⁴ Muhammad Insa Ansari, *Partai Politik Lokal Dalam Tata Hukum Indonesia*. (Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 2, 2017). Hal. 223

kepercayaan melalui hasil pemilu, seperti yang dilakukan oleh Faisal Akbar dan Dr. Mujibussalim, SH,.M,Hum, melalui jurnal terbitan prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, dengan judul penelitian “Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Partai Daulat Aceh Pada Tahun)”. Penelitian ini menunjukkan faktor yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap PDA, dalam hal ini PDA perlu melakukan branding partai agar mendapatkan kepercayaan masyarakat dan terobosan baru agar PDA dapat menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap partai tersebut.¹⁵

Adapun strategi PDA terkait eksistensinya sebagai partai politik lokal adalah membangun komitmen dalam mengawal proses pemilihan, Karena PDA mendapatkan banyak kecurangan di lapangan, PDA mengalami banyak kecolongan suara, jika tanpa kecurangan seharusnya PDA banyak memperoleh suara di pemilihan legislatif. Strategi lain yang digunakan PDA adalah melakukan rekrutmen yang sederhana dan diplomatis, dimana kader yang direkrut ini pada umumnya adalah santri-santri dari dayah untuk mengajak generasi muda menjaga eksistensi keberlangsungan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Selanjutnya skripsi Khairunnisa Lubis, dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang berjudul ”Eksistensi Partai Golkar Dalam Politik Lokal: Studi Kasus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten

¹⁵Faisal Akbar,Dr Mujibussalim, SH, M,Hum, *Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Vol 2, Nomor 2, 2017, hal. 230-247

Simalungun Tahun 2004-2009”. Penelitian ini menemukan bahwa elektabilitas Partai Golkar di tingkat legislatif di Kabupaten Simalungun cenderung stabil dan meningkat pada dua periode, yaitu 1994-2004 dan 2004-2009. Sementara di Kabupaten lain perolehan suara Partai Golkar cenderung menurun. Namun, pada tahun 2009 Partai Golkar di Kabupaten Simalungun mengalami kemerosotan, walaupun Partai Golkar tetap menjadi pengisi kursi legeslatif terbanyak di DPRK Kabupaten Simalungun. Konsep partai politik dan politik lokal digunakan untuk menganalisis elektabilitas Partai Golkar dan mengukur eksistensinya di Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungun serta melihat strategi yang digunakan Partai Golkar dalam mencapai dan mempertahankan tingkat elektabilitas pada pemilu legislatif.¹⁶

Ketiga, yaitu “*Pelebagaan partai politik dan faksi intra-partai*” (*Studi tentang kemunculan faksi Anas Urbaningrum dalam partai Demokrat*), skripsi dari Rowdotusya’adah mahasiswa ilmu politik, FISIP, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.¹⁷ Penelitian ini mengungkapkan kehadiran faksi Anas dalam tubuh partai Demokrat yang sebenarnya adalah partai personalistik. Penyebab tumbuhnya faksi ini adalah *shared value* (nilai bersama), yaitu pengedepanan institusialisasi Partai Demokrat yang akhirnya menjadi tujuan bersama. Kedua, *Shared Strategies* (strategi bersama), sebagai tahap lanjutan

¹⁶Khairunnisa Lubis, *Eksistensi Partai Golkar dalam Politik lokal*, Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2014, hal. 50-52

¹⁷Rowdotusya’adah, *Pelebagaan Partai Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi tentang kemunculan faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat)*. Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018

untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, *personal loyalties* (Loyalitas personal), yaitu kader-kader pengikut setia dari faksi Anas yang memiliki nilai dan tujuan bersama serta penggapaian secara bersama.

Anas menganggap, Partai Demokrat tidak terlembaga dengan baik dikarenakan terlalu berketergantungan terhadap figur dari pak Susilo Bambang Yudhoyono sehingga membahayakan masa depan partai. Faksi Anas berkeinginan untuk melembagakan Partai Demokrat untuk mentransformasikan figur dan ketokohan SBY menjadi kekuatan yang tercermin didalam sistem internal, dan akhirnya menjadi partai modern yang keluar dari personalitasnya. Namun SBY menganggap Faksi Anas membahayakan posisinya, sehingga menghambat Anas untuk mencalonkan diri menjadi ketua umum.

Perbedaan antara penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini adalah pada fokus utama penelitian. Pada dua penelitian sebelumnya berbicara eksistensi. Meskipun juga bersinggungan dengan elektabilitas, namun lebih terpusat pada pertanyaan tentang keberadaan partai tersebut. Berbeda dengan Partai Aceh di Aceh Selatan, dimana keberadaannya telah diakui oleh masyarakat setempat. Pada penelitian terakhir, yang menjadi pembeda dengan penelitian ini yaitu fokus pelebagaan partainya hanya berbicara faksi, sedangkan penelitian ini berbicara keseluruhan untuk mencari titik utama permasalahan agar bisa memberikan solusi.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pelembagaan Partai Politik

Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana pelembagaan aspek internal Partai Aceh khususnya mengenai pengelolaan sistem partai, maka akan digunakan beberapa teori tentang pelembagaan partai politik. Teori pelembagaan (*institutionalisasi*) sangat beragam dengan berbagai perspektif.

Pelembagaan partai menurut pakar politik Inggris, Vicky Randall dan Lars Svasand adalah proses pematapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mengelola sistem maupun secara kultural dalam mempolakan sikap/budaya (*the process by wich the party become established in terms of both integrated patterns on behaviour and of attitude and culture*)¹⁸. Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Apabila kedua aspek ini dipersilangkan, maka akan menghasilkan sebuah tabel yang terbagi kedalam empat bagian, yaitu:

Tabel 1. Dimensi Pelembagaan partai menurut Randall dan Svasand

	Internal	Eksternal
Structural (Struktural)	<i>Systemness</i> (Kesisteman)	<i>Decisional Autonomy</i> (Otonomi Keputusan)

¹⁸ Vicky Randall dan Lars Svasand, "*Party Institutionalization In New Democracies*", Jurnal Partai Politik, Vol. 8, No 1. Januari 2002, hal 13.

Cultural	<i>Value Infusion</i>	<i>Reification</i>
(Sikap)	(Identitas Nilai)	(Reifikasi)

Terdapat dua dimensi yaitu internal dan eksternal serta terdapat dua elemen yaitu elemen struktur (*structural*) dan sikap/budaya (*cultural*) pada pelebagaan partai. Dimensi internal menjelaskan mengenai hubungan antar bagian dalam tubuh partai, yang dimana pada bagian ini berimplikasi pada peningkatan lebih lanjut juga prospek terhadap akuntabilitas pemilu. Dimensi eksternal menjelaskan bahwa partai dalam melembagakan dirinya tidak hanya membentuk bagian dirinya pada dataran internal saja, melainkan perlu membentuk hubungan di luar partai, dimana dalam hal ini partai juga membangun hubungan antara partai dengan pemerintahan, organisasi-organisasi (LSM, OKP, dan sejenisnya) serta masyarakat.

Sebagaimana yang diukur komposisi dari beberapa dimensi pelebagaan partai diatas, terdapat empat aspek yang menentukan bagaimana sebuah partai politik dapat dilihat dan di analisis derajat pelebagaan partai politiknya dengan melakukan penaksiran (*assessment*) terhadap tingkat pelebagaan yang telah berlangsung dalam suatu partai politik:

2.1.1 Dimensi Kesisteman

Yang dimaksudkan dengan kesisteman yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik yang dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh partai politik dalam Anggaran

dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) secara komprehensif. Kesisteman ini meliputi ruang lingkup, keanggotaan dan keberlangsungan interaksi yang membentuk partai menjadi sebuah struktur.

Dalam konteks negara dunia ketiga, derajat kesisteman suatu partai bervariasi menurut:¹⁹

- a) Asal-usul partai politik (*origins*), yaitu bagaimana proses pembentukan partai politik, apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah;
- b) Sumber daya (*resources*) yang dimiliki partai politik, terutama pendanaan, apakah partai memiliki sumber daya yang menjamin kemandiriannya atau masih tergantung pada aktor yang memiliki sumber daya yang berlebih;
- c) Kepemimpinan (*leadership*), melihat siapakah yang lebih menentukan dalam partai: seorang pemimpin partai yang disegani ataukah pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh organisasi sebagai suatu kesatuan;
- d) Faksionalisme (*factionalism*), menyoroiti siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan: faksi-faksi dalam partai ataukah partai secara keseluruhan;
- e) Implikasi klientalisme (*clientalism*) menyelidiki bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah

¹⁹Vicky Randall dan Lars Svasand, “*Party Institutionalization In New Democracies*”, Jurnal Partai Politik, Vol. 8, no 1. Januari 2002. Hal 13

dengan klientelis (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) ataukah menurut konstitusi partai (AD/ART).

2.1.2 Dimensi Identitas Nilai

Identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai politik berdasarkan ideologi atau platform partai, dan karena itu berdasarkan basis sosial pendukungnya, serta identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang di perjuangkan partai politik tersebut. Karena itu derajat identitas nilai suatu partai politik berkaitan dengan:²⁰

- a) Hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (*popular bases*), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung oleh kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, kalangan masyarakat tertentu, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu.
- b) Pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumentalis (anggota selalu mengharapkan materi dari partai) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai). Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas.

²⁰Vicky Randall dan Lars Svasand, "*Party Institutionalization In New Democracies*", Jurnal Partai Politik, Vol. 8, no 1. Januari 2002, Hal 14

2.1.3 Dimensi Otonomi Keputusan

Dimensi otonomi keputusan suatu partai politik berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar) dan sumber dukungan massa organisasi masyarakat.²¹

- a) Apakah partai tergantung kepada aktor luar tersebut ataukah hubungan itu bersifat saling tergantung (interdependen)
- b) Apakah keputusan partai ditentukan oleh aktor luar ataukah hubungan itu berupa jaringan (linkage) yang memberi dukungan kepada partai.

2.1.4 Dimensi Reifikasi

Reifikasi menunjukkan derajat pengetahuan publik tentang partai politik yang merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik. Bila keberadaan partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik, maka pihak lain baik para individu maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan harapan ataupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut. Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai tersebut.²²

²¹Vicky Randall dan Lars Svasand, “*Party Institutionalization In New Democracies*”, *Jurnal Partai Politik*, Vol. 8, no 1. Januari 2002, Hal 14.

²²Efriza, 2012, *Political Explore-Sebuah kajian Ilmu Politik*, Bandung : Alfabeta, halaman 240.

Menurut pakar sosial-politik kontemporer, Larry Diamond dan Richard Gunther ada seperangkat cara yang perlu dilakukan oleh partai pada masa transisional untuk melembagakan dirinya sendiri agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan peran dan fungsi yang semestinya. Sedikitnya terdapat tiga bidang yang perlu diperhitungkan manakala pelembagaan pengembangan partai politik hendaknya dikedepankan, yaitu :

- Pertama, keutuhan internal. Suatu keutuhan partai dapat dilihat dari ada tidaknya pembelahan dalam partai (faksionalisme internal). Adanya dialog dalam partai memang prasyarat penting bagi tumbuhnya wacana yang sehat, namun tumbuhnya perdebatan bahkan lahirnya faksionalisme dalam partai akan dapat merugikan pengembangan partai politik ke depan.
- Kedua, ketangguhan organisasi. Partai politik memiliki tujuan dan kepentingan untuk meraih konstituen guna pembangunan legitimasi politik dirinya. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila partai politik berhasil menyebarkan sumber daya ke level-level yang lebih rendah dari pada di tingkat pusat/nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketangguhan partai politik di semua level administrasi pemerintahan perlu dibangun sedemikian rupa, sehingga sumber-sumber daya (manusia, finansial, serta metode) dapat bekerja demi kepentingan dan tujuan partai politik dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- Ketiga, identitas politik partai. Identitas partai menjadi penting ketika partai berupaya untuk mengejar jabatan di pemerintahan. Karena itu

gagasan yang jelas dan konstruktif, prinsip-prinsip yang berorientasi publik, pelibatan anggota partai, serta program-program yang matang menjadi citra yang perlu dibangun dalam mengonstruksi identitas partai yang kuat. Untuk tujuan itu, partai politik harus memiliki gagasan yang jelas mengenai realisasi kebutuhan pemilih.²³

2.2 Konsep Elektabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elektabilitas adalah kemampuan atau kecakapan untuk dipilih menduduki suatu jabatan dalam pemerintah.²⁴ Elektabilitas selalu dikaitkan dengan pemilihan dan politik, karena selalu berbicara tentang “keterpilihan” pada jabatan tertentu, baik jabatan formal maupun non formal.

Elektabilitas dalam pemaknaan politik adalah tingkat keterpilihan suatu partai, atau kandidat yang terkait dengan proses pemilihan umum.²⁵ Tingkat keterpilihan ini menjadi kadar pengukuran terhadap sosok yang diukur elektabilitasnya, terlepas dari pengukuran lewat apa dan dengan cara yang bagaimana. Elektabilitas sering disama-artikan dengan popularitas, padahal keduanya mempunyai makna dan konotasi yang berbeda meskipun keduanya mempunyai kedekatan dan korelasi yang besar. Popularitas lebih banyak berhubungan dengan dikenalnya seseorang, baik dalam arti positif ataupun

²³Larry Diamond & Richard Gunther, 2001, *Political Parties and Democracy*, London: The John Hopkins University Press, hal 21.

²⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/elektabilitas>, tanggal Akses 07/01/19

²⁵Indra Gosal, *Elektabilitas Syahrul Yasin Limpo Pada Pemilihan Gubernur 2013 Di Kabupaten Toraja Utara*, Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2015. hal 15.

negatif. Sementara elektabilitas berarti kesediaan orang memilihnya untuk jabatan tertentu. Artinya elektabilitas berkaitan dengan jenis jabatan yang ingin diraih, bukan tingkat dikenalnya seseorang oleh khalayak ramai.

Menurut Robert Tanenbaum, pemimpin politik adalah mereka yang menggunakan wewenang-wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol para bawahan atau rakyat yang bertanggung jawab supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan politik yakni kesejahteraan rakyat.²⁶ Syarat umum itu, dalam teori politik modern dirumuskan dalam tiga hal, yakni:

- 1) Akseptabilitas
- 2) Kapabilitas
- 3) Integritas

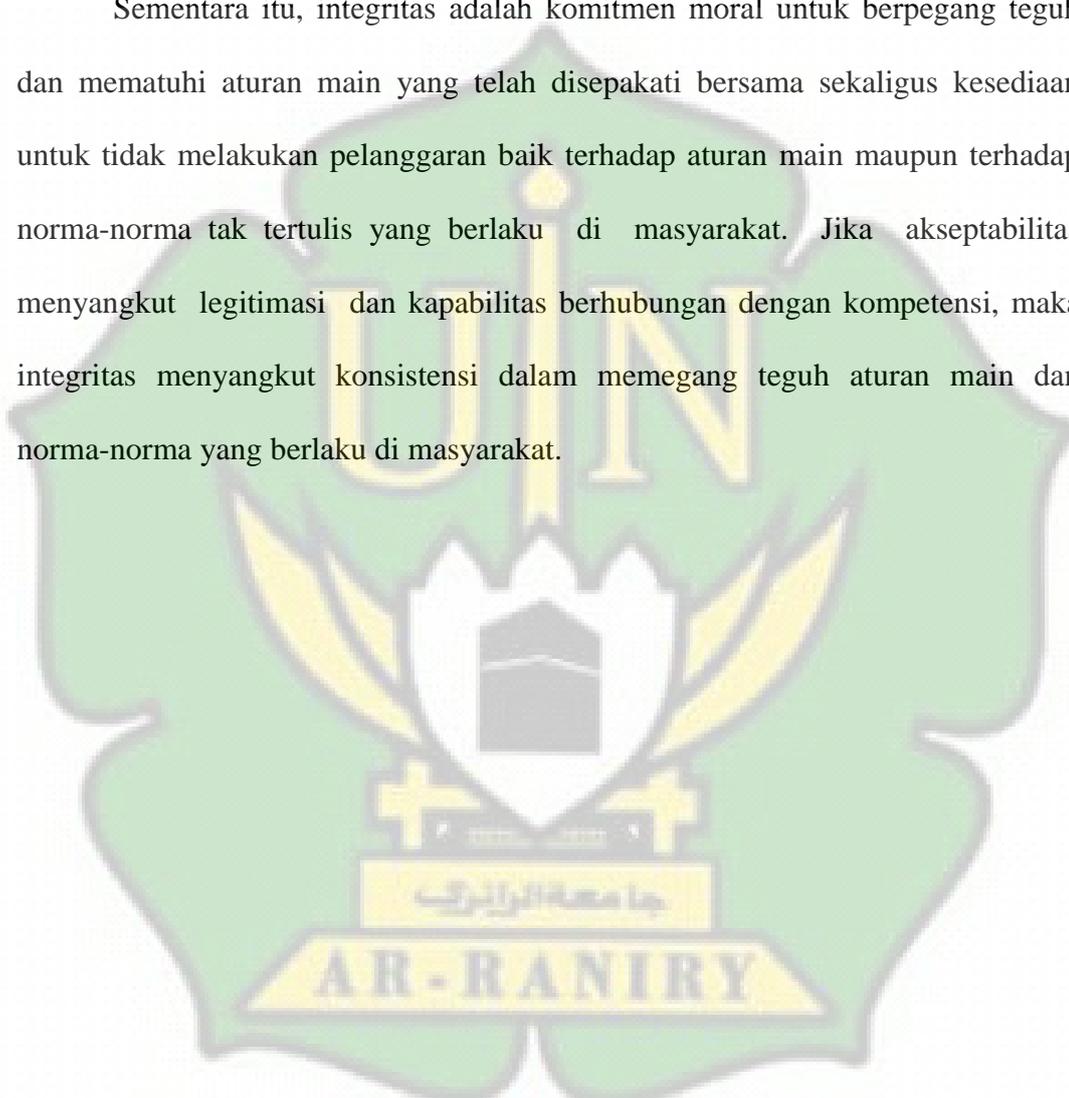
Akseptabilitas memberikan celah kepada seseorang untuk dapat masuk dan diterima oleh masyarakat. Seseorang baru dianggap sah mencalonkan sebagai kandidat yang tampil apabila ada yang menginginkannya untuk tampil dan menjadi pemimpin. Hal ini di dalam bahasa politik disebut dengan legitimasi, karena setelah adanya dorongan dari masyarakat atau dengan kata lain mendapat izin, maka dengan sendirinya pengakuan itu muncul secara tidak langsung.

Jika akseptabilitas berbicara tentang penerimaan sosok seorang pemimpin, lain halnya dengan kapabilitas. Kapabilitas berbicara tentang kelayakan seseorang

²⁶Robert Tannenbaum, Irving R. Weschler, Fred Massarik, *Leadership and Organization. A behavioral science approach*, Abingdon, Oxon: Routledge, London, 2013. Hal.24

untuk hadir sebagai seorang pemimpin. Seseorang yang mempunyai kemampuan atau kecakapan dalam memimpin suatu institusi itu dianggap mempunyai kapabilitas dalam politik dan mempunyai syarat sebagai seorang pemimpin.

Sementara itu, integritas adalah komitmen moral untuk berpegang teguh dan mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama sekaligus kesediaan untuk tidak melakukan pelanggaran baik terhadap aturan main maupun terhadap norma-norma tak tertulis yang berlaku di masyarakat. Jika akseptabilitas menyangkut legitimasi dan kapabilitas berhubungan dengan kompetensi, maka integritas menyangkut konsistensi dalam memegang teguh aturan main dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan suatu penelitian.²⁷ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat tertangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok yang diamati oleh peneliti.²⁸ Ada beberapa unsur dalam penelitian yang harus ditentukan yaitu:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari masyarakat, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis. Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti,

²⁷Sutrisno Hadi. *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Fiskologi UGM, 1993), hal. 124.

²⁸Nana Syaodih Sukmadinata. *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 96.

yang dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati.²⁹

Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk *deskriptif*, yaitu penelitian yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak).³⁰

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam melaksanakan penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada riset dan data dipergunakan dalam suatu riset yang merupakan data yang harus benar, kalau diperoleh dengan tidak benar maka akan menghasilkan informasi yang salah.

Pengumpulan data (*input*) merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung (*primer*) atau tidak langsung (*sekunder*) untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan (*process*) suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (*output*) dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.

²⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21-23.

³⁰Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 130.

Teknik pengumpulan data adalah sesuatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan dengan menggunakan beberapa *literature* atau bahan perpustakaan lain yang mendukung penyusunan skripsi ini. Selain itu, untuk mendapatkan data dalam penelitian ini juga mengambil data dari media online sebagai sumber pendukung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dengan *field research* (penelitian lapangan) yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.2.1 Observasi

Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah yang sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lokasi penelitian³¹. Setiap pengamatan dengan cara cermat, lalu dicatat hal-hal penting sebagai data primer. Catatan-catatan harian, sebagai data penting tersebut akan diolah untuk dianalisis.

3.2.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut³². Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh

³¹Consuelo G. Sevilla, dkk., , *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta, UI Press: 2000), hal. 198.

³²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya: 2005), hal. 216.

hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berencana, yaitu instrumen penelitiannya dipersiapkan, namun tidak mesti terfokus pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena disesuaikan dengan kondisi saat wawancara.

Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan wawancara, wawancara dalam penelitian ini menggunakan model wawancara terbuka karena peneliti menghendaki informan memberikan informasi yang tidak terbatas. Pemilihan ini dilakukan demi memperoleh suatu informasi yang mungkin tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup.

Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak internal Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan, sebab pastinya mereka yang paling mengerti tentang kondisi dan situasi partai saat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Legislatif dan internal partai merupakan bagian dari tim pemenang kandidat yang diusung oleh Partai Aceh. Penulis juga meneliti masyarakat untuk mengetahui elektabilitas Partai Aceh, juga untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang Partai Aceh (reifikasi).

3.2.3 Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh

subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.³³ Studi ini sebagai penyempurnaan untuk pematapan penelitian, sehingga menambah kepercayaan pada penelitian. Dokumentasi yang dimaksud berupa foto dokumentasi pemilihan ketua DPW Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan, Surat Keputusan (SK) Struktur dan Pengurus DPW Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan, dan foto-foto saat wawancara.

3.3 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis itu diterima atau di tolak berdasarkan data yang terkumpul.³⁴

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* menyatakan bahwa analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

³³Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), hal. 143

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta: 2010), hal. 244.

Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai saat ini, dan melihat kaitan variabel-variabel yang ada.³⁵

Setelah semua data terkumpul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi maka semua data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data ini adalah mendeskripsikan data secara bertahap sesuai dengan pedoman wawancara seperti yang telah tersusun. Hal ini dilakukan agar dapat menggambarkan data yang ada, guna memperoleh hal yang nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Pendeskripsian ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang nyata tentang permasalahan yang ada. Menurut Lexy J. Moleong metode analisis data ini dinamakan juga dengan “*Grounded Research*”. Secara umum, proses analisis data mencakup tahap reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja, uraiannya sebagai berikut.³⁶

3.3.1 Reduksi Data

Dari data yang telah dikumpulkan, setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, peneliti kemudian mereduksi data, yaitu dengan cara mengidentifikasi satuan, bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan

³⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 26

³⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal.288.

dengan fokus dan masalah penelitian. Sesudah satuan diperoleh langkah berikutnya yaitu membuat pengkodean (*coding*), yaitu memberikan kode pada setiap satuan agar satuan tetap dapat ditelusuri, berasal dari mana data tersebut.

3.3.2 Kategorisasi

Proses kategorisasi yaitu dengan cara memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan, kemudian setiap kategori diberikan nama yang disebut label. Dari hasil wawancara, setiap jawaban yang sama disatukan dan kemudian diberi label.

3.3.3 Sintetisasi

Proses sintetisasi yaitu mencari kaitan antara kategori satu dengan kategori lainnya, kemudian kategori satu dengan kategori lainnya diberi nama atau label. Hasil wawancara tersebut setelah kita beri label kategorisasi kemudian kita kaitkan dengan jawaban lain sehingga hasil wawancara tersebut dapat kita deskriptifkan dengan cara yang benar dan mudah untuk dipahami.

3.3.4 Menyusun Hipotesis Kerja

Hipotesis ini dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pernyataan yang proposisional. Hipotesis kerja ini sudah merupakan teori substantif yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data. Hipotesis ini sekaligus menjawab pertanyaan penelitian. Oleh sebab itu, setelah kita mereduksi data,

mengkategorikan data serta mengkaitkan antara kategori satu dengan kategori lainnya barulah menyusun hipotesis kerja yaitu menarik sebuah kesimpulan dan dijadikan sebagai sebuah teori.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Partai Aceh

4.1.1 Sejarah Partai Aceh

Sebagaimana yang telah dijelaskan di latar belakang, bahwa Aceh mendapat keistimewaan untuk mendirikan partai politik lokal yang diperjuangkan bersama dalam usaha perdamaian dengan Pemerintah Indonesia, atau yang lebih kita kenal dengan MoU Helsinki menjadi landasan didirikannya partai Aceh. Di dalam butir-butir nota kesepahaman MoU Helsinki pada bagian partisipasi politik dijelaskan bahwa: “Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, Pemerintah Republik Indonesia menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan Nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah Republik Indonesia, dalam tempo satu tahun, paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaksanaan nota kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut”.³⁷

³⁷Syamsuddin Bahrum, *Dinamika Partai Politik Lokal*, Jurnal Al-Lubb, Vol 1, No.1, 2016. Hal 137

Kemudian, Pemerintah Indonesia mengeluarkan legitimasi hukum partai politik lokal lewat Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 sebagai langkah lanjutan dari nota kesepahaman di atas. Lalu kemudian partai Aceh dibentuk. Jika dilihat awal mula pembentukan partai Aceh sendiri, pimpinan politik GAM Malek Mahmud memberikan surat mandat kepada Tgk Yahya Mu'ad, S.H untuk membentuk partai politik lokal bernama partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 19 Februari 2007. Partai GAM berdiri dengan akta notaris H. Nasrullah, SH pada tanggal 07 Juni 2007 dengan pendaftaran Kantor Wilayah Hukum dan HAM dengan Nomor WI.UM.08.06-01.³⁸

Namun Pemerintah Indonesia tidak menyetujuinya, karena terkesan ingin melanjutkan cita-cita perjuangan, yaitu merdeka dan membentuk negara sendiri. Pemerintah Indonesia juga melarang pemakaian bendera GAM pada lambang partai dengan alasan yang sama. Lalu, kemudian berganti nama menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri. Namun pemerintah Indonesia juga tidak menyetujuinya dengan dalih yang sama. Pada akhirnya, pada awal Mei 2008 berganti menjadi Partai Aceh sampai dengan sekarang.³⁹

³⁸<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/tujuan-partai-politik-lokal-di-aceh/>
Tanggal akses 10/12/19

³⁹Syamsuddin Bahrum, *Dinamika Partai Politik Lokal*, Jurnal Al-Lubb, Vol 1, No.1, 2016, Hal 138

4.1.2 Platform Partai Aceh

a. Visi dan Misi

Partai Aceh mempunyai visi membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda-tangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Sedangkan misi Partai Aceh adalah menstranformasi dan/atau membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra *revolusi party* menjadi citra *development party* dalam tatanan transformasi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia.⁴⁰

b. Asas dan Sifat

Partai Aceh bersifat independen dan terbuka, berfungsi sebagai alat pemersatu perjuangan politik rakyat Aceh. Berarti, partai ini tidak boleh terafiliasi oleh pihak manapun selama itu bertentangan dengan kepentingan rakyat Aceh. Kemudian Partai Aceh berpegang teguh pada asas Islam, Undang-Undang Dasar 1945, serta Qanun Meukuta Alam Al-Asyi.⁴¹

⁴⁰Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh, Bab 1

⁴¹Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh

c. Tujuan dan Usaha

Tujuan pembentukan Partai Aceh ini ialah:

- 1) Mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat bangsa, agama, dan negara;
- 2) Mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditanda tangani oleh Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 agustus 2005 di Helsinki, Finlandia;
- 3) Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur, dan merata baik secara materi maupun spiritual bagi seluruh rakyat Aceh; dan
- 4) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia.

Dalam tahapan untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa usaha yang harus dilaksanakan oleh Partai Aceh, yaitu: ⁴²

- 1) Menghidupkan nilai-nilai sejarah perjuangan rakyat Aceh
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju kehidupan bangsa yang maju dan bermartabat
- 3) Melaksanakan pendidikan politik bagi rakyat Aceh
- 4) Proaktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

⁴²Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh, Bab 2

d. Susunan Partai

Susunan Partai terdiri dari:

- 1) Dewan Pimpinan Aceh (DPA) atau Majelis Pembina/Penasehat (Majeulih Tuha Peut), dan Dewan Pimpinan Harian Partai.
- 2) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau Kabupaten/Kota terdiri dari Majelis Pembina/Penasehat (Majeulih Tuha Peut), atau Dewan Pimpinan Harian.
- 3) Dewan Pimpinan Sagoe (DPS) atau Kecamatan terdiri dari Majelis Pembina/Penasehat (Majeulih Tuha Peut), dan Dewan Pimpinan Harian.
- 4) Dewan Pimpinan Mukim (DPM) terdiri dari Majelis Pembina/Penasehat (Majeulih Tuha Peut), dan Dewan Pimpinan Harian.
- 5) Dewan Pimpinan Gampong (DPG) terdiri dari Majelis Pembina/Penasehat (Majeulih Tuha Peut), dan Geuchik Partai.

4.1.3 DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan

Aceh Selatan merupakan daerah basis konflik yang mengalami intensitas konflik lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang ada di sepanjang pantai barat selatan. Oleh karena itu Partai Aceh cepat berkembang di daerah Aceh Selatan karena masyarakat juga merasa ikut dalam perjuangan dalam konflik dan usaha mencapai perdamaian.⁴³ Tentu, masyarakat antusias dengan berdirinya

⁴³ Hasil wawancara dengan Idrus TM, Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 5 Desember 2019

Partai Aceh karena dianggap merupakan bagian dari masyarakat yang awalnya berjuang bersama-sama dalam mencapai perdamaian.

Pada periode awal pembentukan kepengurusan, ada beberapa orang yang berjasa membangun Partai Aceh di Aceh Selatan, yaitu Tgk Rizwan, Muhammad Natsir dan Zulkifli (pasangan calon bupati dan wakil bupati periode 2013-2018 yang diusung partai aceh), dan ketiganya ialah eks kombatan GAM.⁴⁴ Tgk Rizwan merupakan ketua DPW Partai Aceh pertama di Aceh Selatan yang mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam tatanan kelembagaan Partai Aceh pada masanya, dan hingga saat ini.

DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan baru saja melakukan Musyawarah Wilayah karena masa kepengurusan sebelumnya sudah habis. Idrus TM terpilih menjadi ketua setelah mendapatkan suara terbanyak dan mengalahkan 4 kandidat lainnya. Pengguna hak suara ialah dari Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh dari seluruh kecamatan yang terdiri dari ketua dan sekretaris. Pemilihan calon ketua juga melibatkan unsur KPA dari 22 Sagoe dalam Wilayah Lhok Tapaktuan. Pengguna hak suara terdiri dari Ketua Sagoe dan Ulee Balang Sagoe. Berikut perolehan suara calon ketua DPW Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan.⁴⁵

⁴⁴Hasil wawancara dengan Idrus TM, Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 5 Desember 2019

⁴⁵<https://aceh.tribunnews.com/2019/09/23/idrus-tm-terpilih-sebagai-ketua-dpw-pa-aceh-selatan> Tanggal akses 03/01/2020

Tabel 2. Hasil Musyawarah Wilayah DPW Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan untuk periode 2019-2024

NO	NAMA CALON	TOTAL SUARA
1	JALALUDDIN	11
2	JASADI	14
3	LISA ELFIRASMAN, ST	44
4	IDRUS TM	73
	<i>RUSAK</i>	2

Dalam berlangsungnya periode ini, kepengurusan Partai Aceh pun mulai dibentuk. Berikut adalah struktur kepengurusan DPW Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 3. Struktur Pengurus Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan Peride 2019-2024

NO	Susunan Jabatan	Nama-Nama	Basic
A	Majelas Tuha Peut		
	Ketua	Tgk. Jasadi Yasin	Eks Kombatan
	Sekretaris	Saudi Andra	Eks Kombatan
	Anggota	Idrus, TM	Eks Kombatan
	Anggota	Safiron	Eks Kombatan
	Anggota	Tgk. Adi Zulmawar	Kader/Masyarakat
	Anggota	Muchlis	Eks Kombatan

	Anggota	Arman Iswar	Eks Kombatan
	Anggota	Aswadi	Eks Kombatan
	Anggota	Muhd Raqib	Eks Kombatan
	Anggota	Irfaha Manaf	Eks Kombatan
	Anggota	Sudirman (Ust)	Eks Kombatan
	Anggota	Tgk Ismizar, SE	Eks Kombatan
B	Majelis Tuha Lapan		
	Ketua	Abdul Khadir	Eks Kombatan
	Sekretaris	Mustaruddin	Kader/Masyarakat
	Anggota	Junaidi	Kader/Masyarakat
	Anggota	Aliman	Eks Kombatan
	Anggota	Mizar	Kader/Masyarakat
	Anggota	Martunis	Eks Kombatan
	Anggota	Amri	Eks Kombatan
	Anggota	Dastur	Eks Kombatan
	Anggota	Murhayat	Eks Kombatan
C	Dewan Pimpinan Wilayah		
	Ketua	Idrus, TM	Eks Kombatan
	Wakil Ketua I	Lisa Elfirasman, ST	Kader/Masyarakat
	Wakil Ketua II	Muzakar	Eks Kombatan
	Wakil Ketua III	Ridwan, A.Md	Kader/Masyarakat
	Wakil Ketua IV	Zulfadhli	Eks Kombatan

	Wakil Ketua V	Aidil (Lemdi)	Eks Kombatan
	Wakil Ketua VI	Sudirman, NJ	Eks Kombatan
	Sekretaris	Adi Samridha, S.Pd.i	Kader/Masyarakat
	Wakil Sekretaris I	Deni Marwan, ST	Kader/Masyarakat
	Wakil Sekretaris II	Subki, AR	Eks Kombatan
	Wakil Sekretaris III	Hendri, S.Sos	Kader/Masyarakat
	Wakil Sekretaris IV	Mirwadi, S.Pd.i	Kader/Masyarakat
	Wakil Sekretaris V	Adi Saputra, S.Hut	Kader/Masyarakat
	Wakil Sekretaris VI	Sabirin	Eks Kombatan
	Bendahara	Lisa Wati	Kader/Masyarakat
	Wakil Bendahara I	Syarkawi, BA	Eks Kombatan
	Wakil Bendahara II	M. Afrijal, HM	Eks Kombatan
	Wakil Bendahara III	Murlidawati	Kader/Masyarakat
	Wakil Bendahara IV	Indah	Kader/Masyarakat
	Wakil Bendahara V	Hendra Janata	Eks Kombatan

Dari tabel kepengurusan di atas, 26 orang atau 63 persen dari total pengurus di atas merupakan eks kombatan GAM dan selebihnya merupakan kader partai.⁴⁶ Dari total 41 orang pengurus inti Partai Aceh, hanya 6 orang yang telah memperoleh pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini menandakan, bahwa komposisi kepengurusan inti Partai Aceh yang memiliki latar belakang

⁴⁶Hasil wawancara dengan Deni Marwan, Wakil Sekretaris DPW Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 5 Desember 2019

pendidikan tinggi masih tergolong lemah. Keberadaan eks kombatan dan pengaruh tingkat pendidikan berdampak pada keberlangsungan interaksi dalam internal partai, meskipun ketua partai mengatakan bahwa dikepengurusan inti ini bukanlah sosok yang bermain di lapangan, karena penetapan mereka didalam pengurus merupakan sebuah penghormatan kepada para petinggi, pembesar dan pendiri partai tersebut.

*“Ini merupakan pengurus inti. Namun kenapa kebanyakan eks kombatan dikarenakan ini adalah bagian dari penghormatan kami kepada pendahulu, mereka merupakan pendiri, pembesar dan petinggi partai, makanya kami posisikan sebagai Tuha Peut dan Tuha Lapan partai”.*⁴⁷

Deni Marwan yang merupakan Wakil Sekretaris DPW Partai Aceh periode 2019-2024 mengatakan bahwa ingin merubah dan mengangkat kembali marwah Partai Aceh sebagaimana saat pertama didirikan.⁴⁸ Pernyataan ini menunjukkan bahwa Partai Aceh sebenarnya sadar bahwa ada kesalahan dalam pelebagaan internal partai, namun tidak ada tindak lanjut untuk perbaikan. Hal ini di dasari dari penilaian bahwa orang di sekeliling ketua dikerumuni oleh eks kombatan, dan akan berdampak pada harmonisasi pengurus ke depan.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Idrus TM, Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 5 Desember 2019

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Deni Marwan, Wakil Sekretaris DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 5 Desember 2019

4.1.4 Perjalanan Electoral Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan: Pemilu dan Pilkada

Setelah pembentukan Partai Aceh pada 2007, Partai Aceh baru mengikuti kontestasi politik pada tahun 2009. Dalam keikutsertaan Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan dalam pemilu tahun 2009 Partai Aceh menguasai parlemen dengan perolehan 10 kursi di DPRK Aceh Selatan dan fraksi Partai Aceh mendapat posisi ketua di DPRK. Pada pemilu 2014, Partai Aceh kembali mengalami kemunduran dalam perolehan kursi di legislatif. Partai Aceh hanya bisa mendapatkan 5 kursi, sekalipun masih berada di atas partai lain dan diimbangi oleh perolehan Partai Demokrat, namun tetap saja hal ini semestinya harus menjadi bahan evaluasi saat itu bagi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Selatan, meskipun masih bisa mempertahankan posisi ketua DPRK. Berikut anggota legislatif dari Partai Aceh pada periode 2009 dan 2014.

Tabel 4. Perolehan kursi DPRK Aceh Selatan hasil pemilu 2009 dan 2014 dari Partai Aceh

NO	Anggota DPRK PA 2009	Anggota DPRK PA 2014
1	Irwanda S	Lisa Elfirasman, ST
2	Martunis	Tgk Adi Zulmawar
3	Rusdianto	Mizar
4	Safiron	Mustaruddin
5	Subki	T. Zulhelmi

6	Sudirman	
7	Syarifuddin	
8	Tgk Ismizar	
9	Zirhan	
10	Zulfadli	

Sedangkan pada kontestasi Pilkada yang diikuti Partai Aceh di Kabupaten Aceh Selatan, Partai Aceh memiliki rekor yang sangat buruk. Selama keikutsertaannya, Partai Aceh tidak pernah menang padahal memiliki elektabilitas yang cukup baik di tingkat pemilihan legislatif. Pada Pilkada tahun 2013, pasangan yang diusung oleh Partai Aceh yaitu Muhammad Natsir dan Zulkifli kalah dan berada di posisi kedua. Pilkada 2018 melanjutkan kemerosotan Partai Aceh di Aceh Selatan. Pasangan calon yang diusungnya yaitu H. Mirwan, SE dan Zirhan, SP untuk menjadi bupati, kalah dari pasangan calon bupati yang diusung partai lokal Aceh lainnya yaitu Partai Nasional Aceh. Berikut hasil perolehan suara Pilkada 2013 di Aceh Selatan.

Tabel 5. Hasil perolehan suara pada Pilkada 2013 di Aceh Selatan

Nomor Urut	Nama Pasangan	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1	Hasmar Yulia, S.Pd – Mudasir, S.Kom	Perseorangan	2.246
2	Muhammad Shaleh P, S.Pd.i – Ridwan A Rachman, MMT	<ul style="list-style-type: none"> • GOLKAR • PPP • PRA 	22.441

3	H. T Sama Indra, SH – Kamarsyah, S.Sos, M.Si	<ul style="list-style-type: none"> • DEMOKRAT • PKPB • PAN 	33.810
4	Drs. H T Darisman – Khaidir Amin, SE	<ul style="list-style-type: none"> • PKPI • SIRA 	14.271
5	Muhammad Natsir – Zulkifli	PARTAI ACEH	23.819
6	Wahyu M Wali Putra, SH –Irwan, SE, M.Si	<ul style="list-style-type: none"> • HANURA • GERINDRA • PDK • PBR • PBA • PPRN • PBB 	14.706

4.2 Elektabilitas Partai Aceh Pada Pilkada 2018 di Aceh Selatan

Pada tahun 2018 dilaksanakan ajang Pilkada serentak yang diikuti oleh 171 daerah yang ada di Indonesia. Di provinsi Aceh, ada tiga kabupaten/kota yang juga ikut serta dalam pelaksanaan Pilkada tersebut, yakni Pidie Jaya, Kota Subulussalam, dan juga Aceh Selatan.⁴⁹ Penyelenggaraan Pilkada untuk memilih kepala daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan kepala daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Diharapkan, dengan adanya Pilkada ini rakyat dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan harapannya.

Aceh Selatan yang merupakan peserta dalam Pilkada serentak 2018 menjadi daerah yang cukup aktif dalam perhelatan yang dilaksanakan 5 tahun

⁴⁹<https://aceh.antaraneews.com/berita/42505/kip-aceh-selatan-launching-pilkada-2018>
Tanggal akses 28/12/2019

sekali tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kandidat yang tampil dalam kontestasi pilkada ini, yaitu mencapai tujuh pasangan. Sesuai hasil pleno KIP Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018, pasangan calon kandidat yang telah ditetapkan yaitu:⁵⁰

Tabel 6. Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati & Calon Wakil Bupati	Partai Pengusung	Jargon Kampanye
1	Tgk Husin Yusuf – Mustafiril	Perseorangan	Pasangan Perjuangan dan Akademisi Pertanian
2	Azwir – Tgk Amran	<ul style="list-style-type: none"> • PNA • HANURA • PKB • PDIP 	Bersama AZAM Aceh Selatan Hebat
3	Zulkarnaini – Muhammad Jasa	Perseorangan	Bersama Rakyat
4	Darman – Baital Makmur	Perseorangan	Sahabat Damba – Menuju Aceh Selatan Mandiri
5	T. Sama Indra – Harmaini	<ul style="list-style-type: none"> • DEMOKRAT • PPP • PAN • NASDEM • GERINDRA • GOLKAR 	Pasangan Putih
6	Mirwan – Zirhan	<ul style="list-style-type: none"> • PA • PKPI • PBB 	Mirah – Muda Berkarya
7	Karman – Afdhal Yasin	Perseorangan	Untuk Aceh Selatan Bersama – Sejahtera – Bermutu

⁵⁰<https://aceh.tribunnews.com/2018/02/13/ini-nomor-urut-satu-hingga-tujuh-paslon-bupatiwakil-bupati-aceh-selatan> Tanggal akses 28/12/2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa hanya ada tiga kandidat yang diusung oleh kekuatan partai politik dan selebihnya menempuh jalur independen. Pada Pilkada serentak ini, pemilihan bupati dan wakil bupati diyakini berpotensi lahirnya gesekan yang cenderung menimbulkan situasi rawan bila tidak diantisipasi secara efektif. Salah satu pemicu adalah faktor kewilayahan dan banyak kandidat yang maju dalam pilkada. Misalnya, wilayah Meukek dan Sawang yang selama ini menjadi lumbung kuat untuk perolehan suara, namun dengan muncul kandidat Teuku Sama Indra dan Azwir, sehingga menjadi menjadi terpecah, karena keduanya dari daerah tersebut. Begitu juga, wilayah Labuhan Haji Raya dengan memunculkan dua orang yang bertarung yaitu Mirwan Amir dan Zulkarnaini. Sedangkan dari wilayah Kluet Raya, pilkada 2018 ini banyak yang berpartisipasi maju, yaitu Karman, Darman, Harmaini, Tgk Husin Yusuf. Banyaknya tokoh yang muncul menyebabkan pertarungan sangat ketat, apalagi masih kentalnya sentimen primordial kesukuan, relasi organisasi keagamaan dan emosional dan kedekatan.⁵¹

Namun ini merupakan pemetaan wilayah menurut asal dari kandidat tersebut, berbeda halnya dengan penjaringan suara masing-masing partai mengingat kandidat yang kuat merupakan pasangan yang diusung oleh partai. Hal ini didasari dari perolehan suara akhir, yang dimenangkan oleh Azwir – Tgk Amran. Berikut hasil perolehan suara terakhir Pilkada 2018.

⁵¹<https://dialeksis.com/Indepth/netralitas-penyelenggara-pilkada-2018-bagian-iii/> Tanggal akses 29/12/2019

Tabel 7. Hasil Pilkada 2018 Kabupaten Aceh Selatan

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati & Calon Wakil Bupati	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1	Tgk Husin Yusuf – Mustafiril	Perseorangan	5.799
2	Azwir – Tgk Amran	<ul style="list-style-type: none"> • PNA • HANURA • PKB • PDIP 	46.667
3	Zulkarnaini – Muhammad Jasa	Perseorangan	1.396
4	Darman – Baital Makmur	Perseorangan	1.454
5	T. Sama Indra – Harmaini	<ul style="list-style-type: none"> • DEMOKRAT • PPP • PAN • NASDEM • GERINDRA • GOLKAR 	37.608
6	Mirwan – Zirhan	<ul style="list-style-type: none"> • PA • PKPI • PBB 	33.972
7	Karman – Afdhal Yasin	Perseorangan	3.284

Tabel diatas menjelaskan bahwa elektabilitas Partai Aceh masih tergolong sedang, dibandingkan dengan kandidat yang lain. Terlihat dari hasil perolehan suara yang didapat berada pada peringkat ketiga. Namun yang perlu digaris bawahi adalah Partai Aceh dan koalisi berada di bawah kandidat yang diusung oleh partai-partai lain, atau dengan kata lain jika mengukur elektabilitas partai-partai, Partai Aceh berada di urutan bawah, karena kandidat dengan perolehan suara dibawah Partai Aceh merupakan kandidat dari jalur perseorangan.

Fenomena ini semakin membuktikan bahwa Partai Aceh mengalami kemerosotan yang cukup signifikan dilihat dari tingkat keterpilihannya. Hal ini dipengaruhi oleh pemberitaan di media massa tentang kondisi internal Partai Aceh yang saling berbenturan antar sesama petinggi partai pada saat penyaringan kandidat untuk tampil pada Pilkada 2018 ini. Sehingga berefek pada elektabilitas Partai Aceh pada Pilkada 2018. Selain itu, isu yang berkembang di masyarakat Aceh Selatan bahwa Partai Aceh ini dianggap adalah kepentingan kelompok para eks kombatan, sehingga memberi *gap* antara masyarakat dengan pengurus Partai Aceh.⁵²

4.3 Pelembagaan DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan: Eksternal dan Internal

4.3.1 Dimensi Kesisteman

Dalam mengukur pelembagaan partai, sebuah partai tidak terlepas dari prosedur dalam pelaksanaan fungsi partai. Dengan kata lain, prosedur ini lahir untuk mengantisipasi akan kesemerataan partai sebagai sebuah organisasi yang menyaratkan keteraturan agar terciptanya stabilitas.⁵³ Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa partai ini merupakan partai yang lahir dari gerakan separatis GAM, sehingga nilai-nilai pergerakan tersebut masih ada dalam tubuh

⁵²Hasil Wawancara dengan Afrizal, masyarakat Jamboe Papeun, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 2 Januari 2020

⁵³Rizkika Lhena Darwin, *Institualisasi Partai Aceh: Patronase dan Konsolidasi dalam Transisi Demokrasi Pasca Konflik*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 2, Juli 2016. Hal 83

partai apalagi jika kita lihat sekarang kepengurusan dalam tubuh partai didominasi oleh eks kombatan. Sebagaimana ungkapan ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan yang mengatakan bahwa Partai Aceh merupakan titipan konflik dan merupakan kewajiban mereka dalam merawat perdamaian.⁵⁴

Tabel 8. Mengukur derajat kesisteman Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan

(Sumber: olah data peneliti)

Variabel	Kuat	Sedang	Lemah	Keterangan
Asal usul partai			Lemah	Dimana berasal dari gerakan separatis yang bertransformasi ke partai politik. tentu sedikit banyak akan membawa pola top down
Sumber daya			Lemah	Sumber daya partai masih tergantung pada partai itu sendiri dan pihak ketiga yang ingin menggunakan partai Aceh sebagai kendaraan politik. Sedangkan sumber daya manusianya masih didominasi oleh eks kombatan, sehingga melemahkan internal partai
Kepemimpinan			Lemah	Secara struktur kepemimpinan partai berusaha profesional dengan struktur, namun di sisi lain keberadaan elit eks kombatan

⁵⁴Hasil wawancara dengan Idrus TM, Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 5 Desember 2019

				GAM masih sangat mempengaruhi kebijakan partai
Faksionalisme	Kuat			Masih mengutamakan ego sektoral, dan terciptanya kubu antar dapil, sehingga terjadilah perpecahan dukungan di tingkat DPS, DPM, sampai DPG.
Implikasi klientalisme		Sedang		Memberikan bantuan kepada kelompok nelayan, berupa perahu dan alat nelayan lainnya sebagai upaya menjaga basis dukungannya. Juga kepada masyarakat korban konflik, seperti janda konflik.

Dari dasar itulah penulis beranggapan bahwa dominasi GAM dalam tubuh partai berasal. Dominasi ini kemudian berefek pada sumber daya yang dimiliki partai, dimana keanggotaan pengurus dianggap lemah karena tidak beragam dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai pengurus partai seperti pada umumnya. Sebagaimana penulis kutip daripada pernyataan dari tokoh pemuda Kluet Tengah, yaitu Jannatul Amin yang mengatakan bahwa:

*“Salah satu penyebab turunnya elektabilitas Partai Aceh ialah orang-orang yang di dalam kepengurusan partai Aceh masih kurang begitu memahami bagaimana caranya manajemen politik itu, intinya di sumber daya manusianya. Sehingga perlu dilakukan perekrutan kader yang betul-betul paham akan politik karena itu akan berpengaruh pada elektabilitas partai”.*⁵⁵

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Jannatul Amin, Tokoh pemuda Meugamat, kecamatan Kluet Tengah, kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 2 Januari 2020

Pada sumber pendanaan, Partai Aceh masih bergantung pada sumber dana partai yang didapat dari pemerintah, di samping adanya tambahan dari pihak ketiga yang ingin menggunakan Partai Aceh sebagai kendaraan politik untuk maju dalam kontestasi politik seperti pemilu dan pilkada.⁵⁶ Hal ini memang lumrah sebagaimana partai yang lainnya, namun dengan mengikuti sistem yang demikian membuat Partai Aceh terkesan terbuka, demokratis dan tidak serta merta di isi oleh eks kombatan GAM, yang penting mengedepankan kepentingan rakyat Aceh.

Pada pelembagaan sistem partai, sebenarnya tatanan sistem Partai Aceh sudah cukup baik, Partai Aceh berusaha profesional dan terstruktur, namun karena memang asal partai ini merupakan transformasi dari gerakan geriliya, akhirnya masih membawa pola pergerakan lama, yaitu sistem komando. Seperti yang disampaikan Razikin, masyarakat Kedai Kandang, Kecamatan Kluet Selatan kepada peneliti, bahwa:

“Ada orang-orang lama dan memakai cara-cara lama dalam membangun komunikasinya di bawah (akar rumput), bukan di dalam partai tetapi komunikasi dengan masyarakat. Contoh misalnya begini, masyarakat kan sudah mulai sadar akan politik, artinya ketika kita bilang partai Aceh ini partai orang kita, harus pilih, kalau gak... Hal-hal begini kan sudah tidak bisa lagi kita lakukan, karena memang dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini sudah ada perubahan-perubahan mindset dalam politik, bukan salah masyarakat juga tapi dari partai itu sendiri, karena masyarakat juga telah memberikan beberapa tahun terakhir untuk menjadi

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Deni Marwan, wakil sekretaris DPW Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 5 Desember 2019.

kepercayaan dari masyarakat di legislatif misalnya, juga tidak bisa di pertanggungjawabkan”⁵⁷

Dari penjelasan tersebut bisa kita lihat bahwa masyarakat sudah jenuh dengan cara-cara klasik yang digunakan Partai Aceh dalam komunikasi politik karena tidak relevan dengan sikap mereka ketika diberi kepercayaan oleh masyarakat. Apalagi jika ada unsur-unsur intervensi di dalamnya, pasti akan membuat masyarakat enggan untuk memilih Partai Aceh. Oleh sebab itu perlu adanya penyegaran dan pembaharuan dalam kepengurusan Partai Aceh yang diliputi oleh orang-orang baru dengan ide-ide dan gagasan yang lebih modern, agar bisa bersaing dalam tatanan demokrasi khususnya di Aceh Selatan.

Pada penentuan keputusan partai juga koordinasinya dengan pusat, Idrus TM mengakui bahwa DPA Partai Aceh menerima apa yang diputuskan oleh DPW Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan, dengan selalu mengkonfirmasi segala sesuatu kepada DPA Partai Aceh selama itu tidak menyalahi aturan AD/ART.⁵⁸ Namun pada penentuan kandidat di pilkada 2018, panglima KPA wilayah Lhok Tapaktuan, Irhafa Manaf mengatakan keputusan calon kandidat yang akan diusung oleh Partai Aceh pada pilkada 2018 di Aceh selatan sepenuhnya di tangan ketua umum DPA Partai Aceh, yaitu Muzakir Manaf.⁵⁹ Hal seperti ini akan menjadikan partai tidak mandiri, sehingga kedepannya akan simpang siur dalam

⁵⁷Hasil wawancara dengan Razikin, masyarakat Kedai Kandang, kecamatan Kluet Selatan, kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 2 Januari 2020

⁵⁸Hasil wawancara dengan Idrus TM, Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 5 Desember 2019

⁵⁹<https://www.ajnn.net/news/arah-dukungan-pa-di-pilkada-aceh-selatan-di-tangan-mualem/index.html> Tanggal akses 29/12/2019

menentukan keputusan. Selain itu, internal DPW Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan juga akan mengalami konflik karena akan beradu antara pro dan kontra dengan keputusan pusat.

Kemudian dalam perjalanan Pilkada 2018, Idrus TM mengakui bahwa dalam hal strategi pemenangan dan tim pemenangan di serahkan kepada koalisi.⁶⁰ Masing-masing diberikan kepercayaan dan tanggungjawab dalam upaya pemenangan kandidat yang diusung, sehingga semuanya bergerak dan bekerja. Berkenaan dengan hasil buruk yang dipetik, Deni Marwan selaku wakil sekretaris DPW Partai Aceh mengatakan bahwa tidak ada permasalahan dalam internal pengurus, DPW Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan sampai saat ini masih kompak dalam membangun dan mengembangkan partai.⁶¹ Namun pengakuan masyarakat mengatakan bahwa ada faksi-faksi dalam tubuh partai. Faksi-faksi ini berasal dari ego dapil (daerah pemilihan) yang mengedepankan daerah kemukimannya masing-masing.⁶² Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa isu primordial wilayah kerap muncul dalam Pilkada di Aceh Selatan. Hal itu juga terjadi dalam tubuh Partai Aceh, dimana masing-masing Sagoe partai punya kepentingannya, sehingga berimbas pada pengambilan keputusan yang tarik ulur dan akhirnya berkesan memaksakan kehendak para petinggi partai. Tidak hanya

⁶⁰Hasil wawancara dengan Idrus TM, Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 5 Desember 2019

⁶¹Hasil wawancara dengan Deni Marwan, Wakil Sekretaris DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 5 Desember 2019

⁶²Hasil Wawancara dengan Pak Rizal, masyarakat Lhok Keutapang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 8 Desember 2019

itu, hal ini juga berimbas pada elektabilitas partai karena permasalahan ini muncul di publik, dan masyarakat menilai bahwa Partai Aceh tidak siap untuk terjun dalam kontestasi tersebut.

Sebenarnya semakin banyak faksi dalam partai semakin bagus karena adanya dinamika politik yang ekspresif dalam partai. Namun jika ini tidak disikapi dengan baik oleh petinggi partai bisa menimbulkan ketidakstabilan dalam tubuh partai sehingga tidak harmonis antar sesama pengurus. Ini akan tergantung bagaimana kepemimpinan seorang ketua. Maka dari itu seorang ketua dituntut harus jeli dan cerdas dalam menanggapi berbagai polemik permasalahan dalam partai, bukannya menebar kekhawatiran.

Antara sesama faksi dalam Partai Aceh berusaha menyodorkan kandidat pilihannya masing-masing. Memang hal seperti ini terbilang baik karena menghidupkan suasana demokrasi dalam partai, namun implikasi klientalisme kerap muncul dalam pengambilan keputusan dan ada upaya untuk mengamankan posisi masing-masing faksi. Anggapan ini muncul karena sebelumnya ada kesan memaksakan kehendak dalam pemilihan kandidat yang akan di usung oleh Partai Aceh.⁶³ Permainan dari elit petinggi Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan ini juga berimbas kepada elektabilitas partai yang akhirnya menurunkan tingkat keterpilihan mereka, karena permasalahan tersebut muncul ke publik.

⁶³Hasil wawancara dengan Idrus TM, Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 5 Desember 2019

Ketua Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan periode sekarang berusaha merangkul semua faksi tersebut dengan memasukkan semua perwakilan sago partai kedalam kepengurusan DPW Partai Aceh. Dia ingin memperbaiki kembali kondisi rumah tangga partai dimulai dari kekompakan pengurus, supaya tercapai harmonisasi dalam kinerja partai.⁶⁴ Namun, karena basic dari eks kombatan GAM membuatnya tidak bisa membatasi jumlah eks kombatan dalam kepengurusan partai. Menurut amatan peneliti, orang yang berada di sekitaran ketua partai juga didominasi oleh eks kombatan GAM, yang nantinya juga akan mempengaruhi kebijakan dari kepemimpinan seorang ketua. Karena itulah perlu penjaringan yang lebih baik dalam seleksi pengurus partai, tanpa pertimbangan dari eks kombatan, namun lebih ke kemampuan yang sesuai kebutuhan partai.

4.3.2 Dimensi Identitas Nilai

Partai Aceh masih membawa prinsip dan nilai-nilai perjuangan yang di pakai oleh GAM pada saat konflik. Seperti asas tambahan selain Undang-Undang Dasar 1945 dan asas keislaman, yaitu asas Meukuta Alam Al-‘Asyi yang merupakan qanun yang dipakai semasa kerajaan Aceh Darussalam dan merupakan doktrin yang dipakai oleh Hasan Tiro untuk membangkitkan semangat orang Aceh dalam berjuang melawan kezaliman orde baru. Asas inilah sebenarnya yang menyemangati eks kombatan dalam memperjuangkan partai Aceh dalam masa

⁶⁴Hasil wawancara dengan Idrus TM, Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 5 Desember 2019

transisi damai pasca konflik, dan menjadi landasan partai dalam berdemokrasi di Aceh.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perjuangan yang dilakukan oleh GAM dan masyarakat Aceh ialah menuntut keadilan dari kezaliman orde baru yang tidak mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, cita-cita tersebut berusaha untuk dilanjutkan oleh para eks kombatan yang terhimpun dalam Partai Aceh karena mereka menganggap itu merupakan tugas mereka.

Dalam usaha tersebut, Partai Aceh berupaya merangkul masyarakat dengan melakukan berbagai pendekatan, salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan-bantuan disaat hari-hari besar Islam seperti idul fitri dan idul adha berupa pemotongan sapi, pembagian sirup, dan pakaian-pakaian yang di bagikan kepada masyarakat. Partai Aceh juga bertindak cepat dalam bencana-bencana alam yang menimpa daerah Aceh Selatan, dan segera menyuplai bantuan.⁶⁵ Hal-hal seperti ini akhirnya membuat beberapa barisan pendukung Partai Aceh bertahan dan masih mendukung Partai Aceh, meskipun mereka tau bahwa internal partai Aceh sendiri masih terbilang lemah. Dalam pengamatan peneliti, basis pendukung Partai Aceh berada di daerah pelosok yang masih tertinggal dan merupakan daerah dengan eks kombatan yang terbilang banyak, sehingga mempengaruhi masyarakat untuk tetap menjadi simpatisan Partai Aceh.

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Afrizal, masyarakat Jamboe Papeun Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 2 Januari 2020

Dalam pandangan masyarakat, yang menilai bahwa Partai Aceh tidak akan berkembang secara politik jika masih mendahulukan orang eks kombatan dalam tubuh partai, dengan alasan rendahnya latar pendidikan dan minim pengetahuan akan politik.⁶⁶ Meskipun mereka menilai bahwa kader Partai Aceh dekat dengan masyarakat karena sering memberikan bantuan dan terjun langsung untuk berbaur dengan masyarakat, namun mereka tetap berupaya obyektif demi untuk kemajuan partai, karena masyarakat menyadari Partai Aceh ini adalah milik rakyat Aceh.

Mengenai hubungan dengan masyarakat, kader partai diakui dekat dengan kelompok para nelayan terutama di Kecamatan Tapaktuan. Para nelayan ini mengatakan bahwa mereka mendapat bantuan berupa pembuatan perahu bagi kelompoknya, dan mengaku bahwa mereka merupakan simpatisan dari Partai Aceh.⁶⁷ Hal ini mengarah pada *value infusion*, yaitu adanya *popular bases* yang selalu mendukung untuk kemajuan partai. Selain itu, pada periode sekarang pengurus Partai Aceh juga berusaha membangun komunikasi dengan organisasi kemahasiswaan yang ada di kabupaten Aceh Selatan. Tidak hanya itu, mereka juga menghimbau dan mengajak generasi-generasi milenial untuk bergabung menjadi kader partai, karena pihak partai mengaku bahwa mereka membutuhkan pikiran dan ide-ide baru dari pemuda-pemudi Aceh Selatan.

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Bisma, masyarakat Lhok Keutapang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 2 Januari 2020

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Pak Rizal, masyarakat Lhok Keutapang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 8 Desember 2019

4.3.3 Dimensi Otonomi Keputusan

Dalam pengambilan keputusan penting, Dewan Pengurus Pusat atau DPA Partai Aceh tidak menekan DPW partai Aceh kabupaten Aceh Selatan. Pihak partai mengakui bahwa selalu mengutamakan keputusan bersama dalam musyawarah, dan mengkonfirmasi segala sesuatu kepada DPA Partai Aceh, selama itu tidak menyalahi aturan AD/ART partai.⁶⁸ Ini membuktikan bahwa sistem satu komando yang di jalankan oleh GAM pada saat konflik sudah mulai memudar. Hal ini bukan tanpa alasan, dikarenakan pihak pusat telah mengetahui bahwa telah ada *gap* dalam tubuh partai Aceh yang membuat DPA Partai Aceh tidak mau terlalu ikut campur.

Kendati demikian, para eks kombatan ini tetap mempengaruhi keputusan partai karena jumlah elit-elit pengurus yang memang basicnya eks kombatan terbilang banyak menguasai dan mengendalikan forum, sekalipun ada orang-orang dengan ide dan pendidikan yang mumpuni dalam kepengurusan Partai Aceh. Hal ini disadari oleh pihak-pihak luar partai dan masyarakat saat pilkada 2013, dan siklusnya kembali terulang pada Pilkada 2018.

4.3.4 Dimensi Reifikasi

Sebagai partai lokal, pastinya Partai Aceh dari awal pembentukan dan keikutsertaan mereka dalam kontestasi politik diketahui oleh masyarakat. Seperti

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Idrus TM, Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 5 Desember 2019

misalnya pada Pilkada 2013, masyarakat Aceh Selatan mengetahui bahwa ada konflik internal dalam tubuh Partai Aceh pada saat penentuan kandidat yang berujung pada kekalahan di Pilkada.⁶⁹ Masyarakat juga bisa menilai bahwa, Partai Aceh ini tidak akan bisa berkembang jika masih didominasi oleh eks kombatan yang terbatas akan pendidikan politiknya, yang akhirnya ide-ide membangun partai itu kurang di dapatkan dari pengurus. Sebagaimana yang diungkapkan Pak Rizal, masyarakat Gampong Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan yaitu:

“Kader PA dekat dengan masyarakat, mereka merangkul masyarakat untuk pembangunan Aceh selatan. Cuma pandangan dari masyarakat kenapa PA itu tidak berkembang secara politik orang-orang kombatan (Eks-GAM), maklumlah orang kombatan ada yang sekolah tinggi ada juga yang rendah, kebanyakannya rendah, makanya sulit. Tapi sekarang PA sudah mulai merangkul daripada kader yang sudah S1, S2, jadi sudah agak lebih baik”⁷⁰

Dari *statement* tersebut dapat kita simpulkan bahwa kelemahan dari Partai Aceh sudah tercium oleh masyarakat. Masyarakat bisa menilai bahwa kekurangan sumber daya manusia telah dialami jauh-jauh hari oleh Partai Aceh, meskipun ada sedikit upaya untuk menutupinya, namun itu belum cukup.

Masyarakat sebenarnya sadar, dengan tidak memilih Partai Aceh terus menerus akan membuat keistimewaan Aceh memiliki partai lokal akan tergerus. Namun tetap saja jika sekat-sekat antara eks kombatan dengan masyarakat masih

⁶⁹Hendra Hasliadi, *Kekalahan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Diusung Partai Aceh Pada Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan 2013*, Skripsi, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2014, Hal. 44

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Pak Rizal, masyarakat Lhok Keutapang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 8 Desember 2019

ada, membuat masyarakat kurang peduli dengan Partai Aceh. Dalam hal ini, masyarakat juga menuntut Partai Aceh untuk berbenah diri dan menata ulang proses pelebagaan Partai Aceh.

4.4 Pengaruh Pelebagaan Terhadap Elektabilitas Pada Pilkada 2018 Di Aceh Selatan

Partai Aceh di Aceh Selatan telah melalui pasang surutnya dalam mengikuti proses perpolitikan mereka di daerah. Baik buruknya hasil yang di dapat itu tergantung bagaimana proses yang dilalui dalam mengelola partai. Hasil tersebut tentu di ukur pada elektabilitasnya yang di peroleh dalam ajang kompetisi politik. Oleh karena itu pengaruh dari pelebagaan partai sangat besar, karena penilaian sebuah partai berasal dari sana.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yaitu tentang pelebagaan Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan, masyarakat dapat menilai lemahnya pelebagaan pada tubuh partai dan berefek pada kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap Partai Aceh. Kehadiran eks kombatan GAM yang mendominasi partai sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, karena masyarakat telah menabur keraguan dan ketidaksukaannya dengan sikap dan gaya politik yang dijalankan oleh para eks kombatan. Sikap politik di maksud tersebut yang seolah-olah kondisi sosial masyarakat masih berada di bawah tekanan konflik, padahal sudah berada pada tahap menjalankan dan menjaga

perdamaian.⁷¹ Oleh karena itu, peran dan jumlah para eks kombatan ini perlu untuk dibatasi dengan cara penyeleksian untuk menjadi pengurus.

Sebagai partai perjuangan, seharusnya Partai Aceh mendapatkan simpati di masyarakat dan memiliki kepercayaan untuk menguasai pemerintahan di kabupaten Aceh Selatan, namun realitas di lapangan berbicara sebaliknya. Masyarakat menyadari bahwa, untuk menjadi pejabat pemerintahan itu harus mempunyai latar belakang pendidikan yang jelas dan mempunyai pengetahuan lebih, dan yang seperti itu kurang terlihat pada pengurus partai dan kandidat yang diusung partai Aceh.⁷²

Pada era sekarang, memang kita harus menyadari bahwa pendidikan politik masyarakat sudah mulai membaik. Masyarakat sudah mengetahui bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu harus mempunyai modal, yaitu modal politik, sosial dan ekonomi.⁷³ Oleh karena itu, untuk mendapatkan simpati masyarakat tidak hanya modal politik saja yang harus di persiapkan, sosial dan ekonomi juga penting.

Pada Pilkada 2018, sebenarnya kandidat yang diusung oleh Partai Aceh sudah memenuhi kriteria sebagaimana yang di jelaskan di atas. Pak Mirwan merupakan dari kalangan masyarakat dan seorang pengusaha yang sudah lama

⁷¹Hasil Wawancara dengan Bisma, masyarakat Lhok Keutapang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 2 Januari 2020

⁷²Hasil Wawancara dengan Pak Rizal, masyarakat Lhok Keutapang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 8 Desember 2019

⁷³Kacung Marijan, *Demokratisasi Di Daerah (Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung)*. (Surabaya: Eureka dan PusDeHAM, 2006). Hal. 85-95

tinggal di Jakarta, dan sesuai dengan titelnya beliau ialah lulusan sarjana ekonomi. Sedangkan kandidat wakil, Pak Zirhan merupakan eks kombatan GAM yang dulu sempat diusulkan sebagai kandidat yang akan diusung pada Pilkada 2013 namun tidak jadi. Kolaborasi dari perwakilan masyarakat dan eks kombatan ini juga tidak membuat masyarakat percaya sepenuhnya kepada kandidat yang diusung Partai Aceh. Jika demikian, berarti ada faktor lain yang membuat Partai Aceh tidak bisa memenangkan kontestasi pilkada 2018.

Dalam wawancara dengan ketua DPW Partai Aceh kabupaten Aceh selatan, menurutnya:

“Masyarakat kebanyakan salah paham terhadap partai Aceh, yang menganggap bahwa partai Aceh hanya kepentingan kelompok eks kombatan GAM, padahal tidak demikian. Kemungkinan memang ada kelemahan dari kami berupa kurang transparan (terbuka) terhadap masyarakat, sehingga menganggap partai Aceh ini hanya milik orang GAM. Makanya saya selaku ketua DPW Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan menghimbau untuk tidak perlu takut kepada partai Aceh, karena sama dengan partai yang lain, bedanya cuma parlok dan parnas”.⁷⁴

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa ada ketidak-sukaan masyarakat dengan Partai Aceh karena dominasi dari eks kombatan GAM dalam tubuh Partai Aceh, sehingga timbul *gap* antara masyarakat dengan pihak partai. Alasan yang sudah pasti mengapa masyarakat tidak senang dengan keberadaan pihak eks kombatan dalam tubuh Partai Aceh sesuai dengan penjelasan di atas tadi yaitu keterbatasan pengetahuan karena didasarkan pendidikan formal yang kurang.

⁷⁴Hasil wawancara dengan Idrus TM, Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 5 Desember 2019

Namun, sesuai dengan pengakuan dari pihak masyarakat yang mengatakan bahwa sebenarnya kandidat yang diusung oleh Partai Aceh pada Pilkada 2018 sebenarnya layak untuk menjadi bupati dan wakil bupati kabupaten Aceh Selatan. Mirwan-Zirhan dianggap bisa bekerja sama dengan instansi pemerintahan karena memiliki gaya komunikasi yang baik dan mempunyai relasi yang kuat untuk memajukan kabupaten Aceh Selatan. Maka dari itu kesalahan-kesalahan itu sebenarnya ada di tubuh partai, seperti pelembagaan partai tersebut.

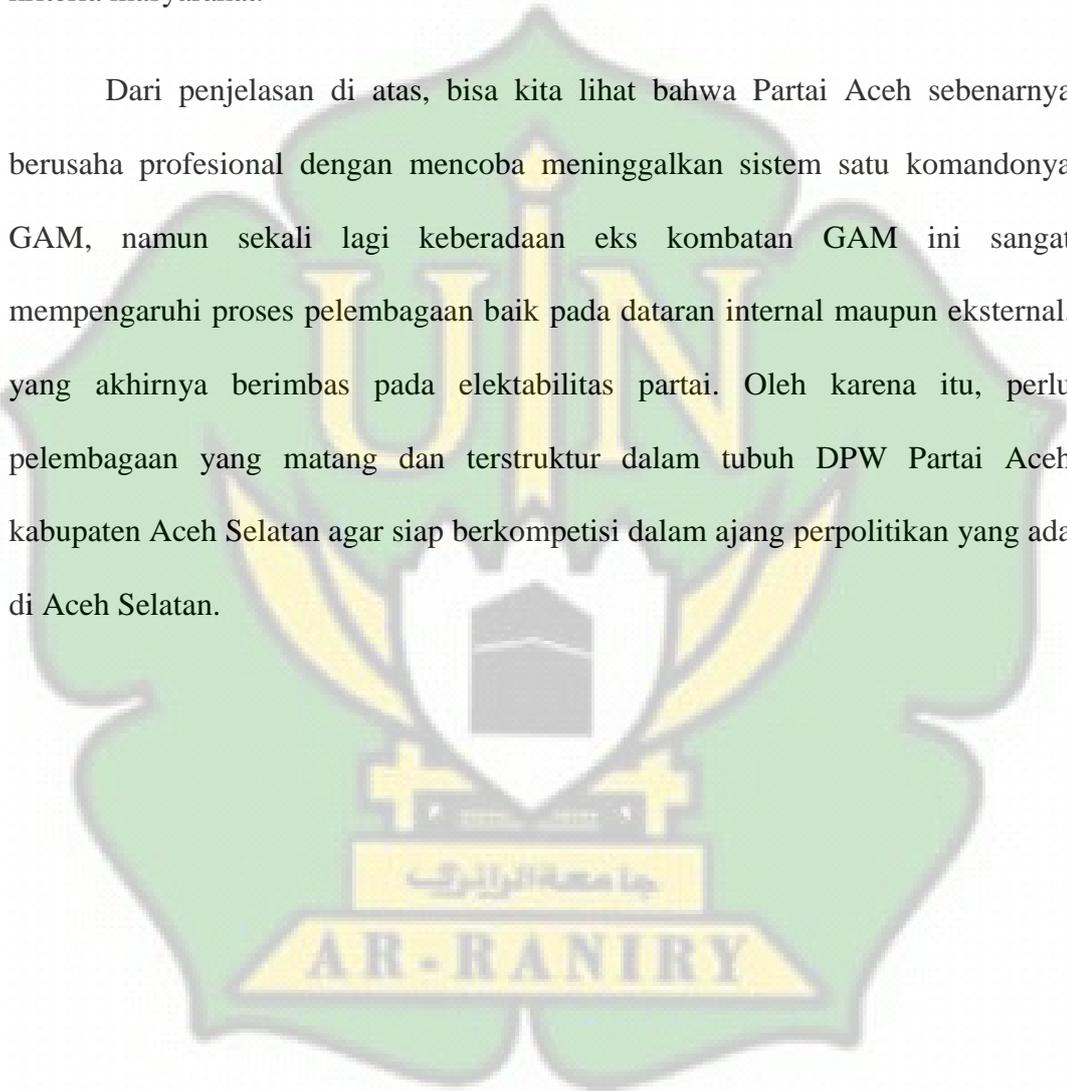
Sebelumnya, Partai Aceh juga mengalami dinamika yang cukup genting saat harus menentukan kandidat yang harus diusung karena harus beradu antar sesama faksi terlebih dulu, meskipun kita ketahui bahwa untuk mengusung kandidat untuk maju pada butuh dukungan dari partai lain, namun Partai Aceh pada Pilkada yang telah diikuti selalu mempunyai modal besar untuk memunculkan calon, sehingga peran mereka lebih besar di dalam koalisi. Masyarakat juga menilai bahwa dalam proses penetapan kandidat, Partai Aceh terlalu tebang pilih atau membuat pengelompokan antara eks kombatan GAM, masyarakat, dan juga dari partai lain, permasalahan yang demikian cepat menguak ke permukaan sehingga mengganggu konsistensi simpatisan dalam mendukung keputusan partai.⁷⁵

Memang pada akhirnya, kandidat yang diusung oleh Partai Aceh pada Pilkada 2018 itu berasal dari kalangan *non party* atau dari masyarakat dan di

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Bisma, masyarakat Lhok Keutapang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 8 Desember 2020

kolaborasi dengan kader Partai Aceh. Namun karena proses pelembagaan yang tidak kondusif membuat iklim politik Partai Aceh sendiri terpengaruhi oleh hal tersebut, padahal kandidat yang diusung sudah dianggap layak dan memenuhi kriteria masyarakat.

Dari penjelasan di atas, bisa kita lihat bahwa Partai Aceh sebenarnya berusaha profesional dengan mencoba meninggalkan sistem satu komandonya GAM, namun sekali lagi keberadaan eks kombatan GAM ini sangat mempengaruhi proses pelembagaan baik pada dataran internal maupun eksternal, yang akhirnya berimbas pada elektabilitas partai. Oleh karena itu, perlu pelembagaan yang matang dan terstruktur dalam tubuh DPW Partai Aceh kabupaten Aceh Selatan agar siap berkompetisi dalam ajang perpolitikan yang ada di Aceh Selatan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelebagaan dan elektabilitas Partai Aceh pada Pilkada Aceh Selatan tahun 2018, maka pada bab ini penulis ingin mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Tingkat keterpilihan atau elektabilitas Partai Aceh pada Pilkada 2018 kabupaten Aceh Selatan cukup lemah dibanding partai-partai lain. Meskipun berada pada posisi ketiga dari total suara seluruh kandidat, namun jika berkaca pada kandidat yang diusung oleh partai politik, Partai Aceh berada di urutan terbawah bersama PKPI dan PBB.
2. Dari empat indikator pelebagaan menurut Vicky Randall dan Lars Svasand, dimensi kesisteman yang paling mendominasi dalam mempengaruhi penurunan elektabilitas Partai Aceh di Aceh Selatan. Hal ini ditinjau dari sumber daya manusia yang didominasi oleh para eks kombatan GAM, yang menurut penilaian masyarakat ada sebagian dari mereka yang tidak layak menjadi pengurus partai karena keterbatasan pengetahuan akan politik. Selain itu, lemahnya elektabilitas Partai Aceh juga disebabkan oleh internal partai yang kurang harmonis saat masa penentuan kandidat. Ada beberapa kubu yang lahir dalam partai dimana kubu ini tercipta dari isu primordial yang

menginginkan orang dari masing-masing daerah mereka untuk tampil pada pilkada.

5.2 Saran

1. Partai Aceh harus segera memperbaiki pelembagaannya sebaik mungkin, mulai dari sumber daya manusianya. Kekuatan eks kombatan harus diimbangi oleh kader-kader berkualitas yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang baik tentang politik. Partai Aceh harus punya kualifikasi yang tinggi dalam penyaringan kader dan pengurus, tanpa melihat intrik-intrik lain saat menempati kader dalam kepemimpinan partai.
2. Pengurus harus bisa menjaga citra partai. Dimulai dari sikap dengan masyarakat, hingga memberikan pemahaman tentang arah partai Aceh kepada masyarakat. Partai Aceh seharusnya bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Partai Aceh merupakan milik bersama, dan menghapus stigma negatif yang muncul di masyarakat yang menganggap bahwa Partai Aceh merupakan kepentingan eks kombatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Chairul Fahmi, *Jejak Konflik Baru di Aceh: Pemetaan Jenis dan Sumber Konflik Politik, Hukum, Sumber Daya Alam, Agama, Etnis dan Ekonomi*, (Banda Aceh: Kesbangpol dan Linmas Provinsi Aceh, 2014)
- Consuelo G. Sevilla, dkk., , *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta, UI Press: 2000)
- Dendi Sugono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Efriza, *Political Explore-Sebuah kajian Ilmu Politik* (Bandung: Alfabeta 2012)
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010)
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Kacung Marijan, *Demokratisasi Di Daerah (Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung)*. (Surabaya: Eureka dan PusDeHAM, 2006)
- Larry Diamond & Richard Gunther, *Political Parties and Democracy* (London: The John Hopkins University Press 2001)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya: 2005)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Novri Susan, M.A, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Robert Tannenbaum, Irving R. Weschler, Fred Massarik, *Leadership and Organization. A behavioral science approach*, Abingdon, Oxon: Routledge, London, 2013

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta: 2010)

Sutrisno Hadi. *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1993)

2. Jurnal

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh

Faisal Akbar, Dr Mujibussalim, SH, M, Hum, *Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Vol 2, Nomor 2, 2017

Hendra Hasliadi, *Kekalahan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Diusung Partai Aceh Pada Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan 2013*, Skripsi, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2014

Indra Gosal, *Elektabilitas Syahrul Yasin Limpo Pada Pemilihan Gubernur 2013 Di Kabupaten Toraja Utara*, Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2015

Khairunnisa Lubis, *Eksistensi Partai Golkar dalam Politik lokal*, Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2014

Muhammad Insa Ansari, *Partai Politik Lokal Dalam Tata Hukum Indonesia*. (Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 2, 2017)

Nurlatipah Nasir, *Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen*, Jurnal Politik Profetik Volume 4, No. 1 (STISIP Tasukmalaya: 2016)

Rizkika Lhena Darwin, *Institusialisasi Partai Aceh: Patronase dan Konsolidasi dalam Transisi Demokrasi Pasca Konflik*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 2, Juli 2016

Rowdotusya'adah, *Pelembagaan Partai Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi tentang kemunculan faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat)*. Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018

Syamsuddin Bahrum, *Dinamika Partai Politik Lokal*, Jurnal Al-Lubb, Vol 1, No.1, 2016

Vicky Randall dan Lars Svasand, "Party Institutionalization In New Democracies", jurnal Party Politics, Vol. 8, no 1. Januari 2002

Zaki 'Ulya, *Refleksi MoU Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Juni 2014

3. Internet

<http://aceh.tribunnews.com/2014/04/27/pa-kehilangan-5-kursi-di-dprk-aceh-selatan> tanggal akses 25 Desember 2018

<http://aceh.tribunnews.com/2018/07/04/hasil-pleno-kip-aceh-selatan-pasangan-azam-unggul-dengan-perolehan-46667-suara> tanggal akses 25 Desember 2018

<https://aceh.antaraneews.com/berita/42505/kip-aceh-selatan-launching-pilkada-2018> Tanggal akses 28 Desember 2019

<https://aceh.tribunnews.com/2018/02/13/ini-nomor-urut-satu-hingga-tujuh-paslon-bupatiwakil-bupati-aceh-selatan> Tanggal akses 28 Desember 2019

<https://dialeksis.com/Indepth/netralitas-penyelenggara-pilkada-2018-bagian-iii/> Tanggal akses 29 Desember 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/elektabilitas>, tanggal Akses 07 Juni 2019

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/tujuan-partai-politik-lokal-di-aceh/> Tanggal akses 10 Desember 2019

<https://www.ajnn.net/news/arah-dukungan-pa-di-pilkada-aceh-selatan-di-tangan-muallem/index.html> Tanggal akses 29 Desember 2019

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/arti-elektabilitas-adalah.html> tanggal akses 8 Juli 2019

<https://www.viva.co.id/arsip/504445-partai-aceh-kuasai-parlemen> tanggal akses 17 Juni 2019

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Pertanyaan untuk pengurus partai aceh

1. Bagaimana proses berdirinya Dewan Pengurus Wilayah Partai Aceh di Aceh Selatan?
2. Sejauh mana partai Aceh melaksanakan fungsi-fungsi partai yang telah ditetapkan dalam AD/ART yang telah disepakati?
3. Bagaimana proses perekrutan kader partai Aceh?
4. Bagaimana system pendanaan partai, apakah mengambil iuran dari kader, atau bagaimana?
5. Bagaimana kepemimpinan/otoritas kebijakan dalam partai?
6. Menurut anda bagaimana pengaruh kepemimpinan ketua partai Aceh?
7. Adakah beberapa orang yang berpengaruh di partai? Apa yang membuat mereka berpengaruh di partai?
8. Apakah terdapat faksi-faksi di dalam partai ini? Jika ada, seberapa besar pengaruh masing-masing faksi dalam pengambilan keputusan-keputusan partai?
9. Adakah partai membangun relasi/kerjasama dengan komunitas atau ormas di wilayah aceh selatan?
10. Apakah masih banyak eks-GAM yang menjadi pengurus partai?
11. Bagaimana cara partai menjaga menjaga citra partai supaya tidak kehilangan simpatisan?
12. Apa saja program yang berdampak bagi masyarakat?
13. Apa saja program yang berdampak bagi kader?
14. Dalam ajang pemilu, apakah partai Aceh selalu menampilkan calon dari kader sendiri?

B. Pertanyaan untuk masyarakat

1. Apa yang anda pikirkan jika mendengar partai Aceh? Dan apa yang membuat anda berpikir demikian?
2. Apa yang anda ketahui tentang program-program partai Aceh?
3. Apakah kader-kader dari partai Aceh dekat dengan masyarakat?
4. Apa anda pernah mendengar/tahu kader-kader partai Aceh pernah melakukan riset untuk mengetahui aspirasi dari masyarakat?
5. Apakah menurut anda kader-kader partai Aceh memiliki kualitas yang baik sebagai politisi?
6. Menurut penilaian anda, apakah para pengurus partai Aceh memiliki hubungan yang harmonis, dalam artian tidak memiliki kubu-kubu?
7. Sejauh yang anda tahu, adakah orang luar partai yang mendanai partai ?
8. Apakah anda memilih kandidat yang diusung oleh partai Aceh pada pilkada yang diikuti oleh partai Aceh di Aceh Selatan?
9. Layak atau tidak menurut anda kandidat yang telah di usung oleh partai Aceh untuk maju pada perhelatan Pilkada yang mereka ikuti di Aceh selatan?
10. Bagaimana pendapat anda tentang kekalahan partai Aceh dipilkada yang pernah diikuti?
11. Menurut anda, apa yang seharusnya dibenahi oleh partai Aceh?
12. Adakah program dari partai Aceh yang berdampak positif bagi masyarakat?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi wawancara dengan Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan, Idrus TM



Dokumentasi wawancara dengan wakil sekretaris DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan, Deni Marwan



Dokumentasi wawancara dengan Pak Rizal dan Bisma, masyarakat gampong Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan



Wawancara dengan Afrijal dan Jannatul Amin, tokoh pemuda Kluet Tengah, Aceh Selatan



Dokumentasi Wawancara dengan Razikin, masyarakat Keude Kandang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan

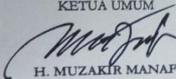
KEPUTUSAN : Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh
 Tentang Struktur dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah
 Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Selatan Periode 2019-2024
 NOMOR : 097/KPTS-DPA/X/2019
 TANGGAL : 10 Oktober 2019

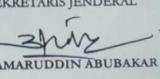
STRUKTUR DAN SUSUNAN
 DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI ACEH
 (DPW-PA) KABUPATEN ACEH SELATAN
 PERIODE 2019-2024

NO	SUSUNAN JABATAN	NAMA-NAMA
A MAJELIS TUHA PEUT		
	KETUA	TGK. JASADI YASIN
	SEKRETARIS	SAUDI ANDRA
	ANGGOTA	IDRUS, TM
	ANGGOTA	SAPRON
	ANGGOTA	TGK. ADI ZULMAWAR
	ANGGOTA	MUCHLIS
	ANGGOTA	ARMAN ISWAR
	ANGGOTA	ASWADI
	ANGGOTA	MUHD RAQIB
	ANGGOTA	ERHAPA MANAF
	ANGGOTA	SUDIRMAN (gmr)
	ANGGOTA	TGK. ISMIZAR, SE*
B MAJELIS TUHA LAPAN		
	KETUA	ABDUL KHADIR
	SEKRETARIS	MUSTARUDDIN
	ANGGOTA	JUNADI
	ANGGOTA	ALMAN
	ANGGOTA	MIZAR
	ANGGOTA	MARTUNIS
	ANGGOTA	AMRI
	ANGGOTA	DASTUR
	ANGGOTA	MURHAYAT
C DEWAN PIMPINAN WILAYAH		
	KETUA	IDRUS, TM
	WAKIL KETUA I	LISA ELPIRISMAN, ST
	WAKIL KETUA II	MUZAKAR
	WAKIL KETUA III	FIDWAN, A.Md
	WAKIL KETUA IV	ZULPAHLI
	WAKIL KETUA V	AIDIL (Lemd)
	WAKIL KETUA VI	SUDIRMAN, NJ
	SEKRETARIS	ADI SAMRIDHA, S.Pd.I
	WAKIL SEKRETARIS I	DENI MARWAN, ST
	WAKIL SEKRETARIS II	SUBKI, AR
	WAKIL SEKRETARIS III	HENDRI, S.Sos
	WAKIL SEKRETARIS IV	MIRWADI, S.Pd.I
	WAKIL SEKRETARIS V	ADI SAPUTRA, S.Hut
	WAKIL SEKRETARIS VI	SABURIN

BENDAHARA	LISA WATI
WAKIL BENDAHARA	SYARKAWI, BA
WAKIL BENDAHARA	M. AFRIJAL, HM
WAKIL BENDAHARA	MURLIDAWATI
WAKIL BENDAHARA	INDAH
WAKIL BENDAHARA	HENDRA JANATA

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 10 Oktober 2019
 DEWAN PIMPINAN ACEH
 PARTAI ACEH

KETUA UMUM

 H. MUZAKIR MANAF

SEKRETARIS JENDERAL

 H. KAMARUDDIN ABUBAKAR

Surat Keputusan (SK) Struktur dan Susunan Pengurus DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan Periode 2019-2024

5-9-2019.

PEROLEHAN SUARA
 CALON KETUA DPW PA. ASEL

NO	NAMA	IML
1	JALALUDDIN	11
2	JASADI	14
3	LISAELVIRASMAN, ST	44
4	IDRUS, TM	73
	RUSOF.	2

Hasil Pemilihan Ketua pada Musyawarah Wilayah DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan